

Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si
Rusmani, S.Ag., MHI
Dr. Dadan Anugrah, M.Si
Vinna Sri Yuniarti, SE., MM



PETA IDEOLOGI UMMAT ISLAM PADA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
(Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa)



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2020

**PETA IDEOLOGI UMMAT ISLAM PADA SISTEM DEMOKRASI DI
INDONESIA**

Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa

Tim Penulis:
Fauzan Ali Rasyid
Dadan Anugrah
Vinna Sri Yuniarti
Rusmani

**LP2M UIN SGD Bandung
2020**

**Peta Ideologi Ummat Islam Pada Sistem Demokrasi di Indonesia:
Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa**

ISBN 978-623-93720-3-3

Penerbit:

LP2M UIN SGD Bandung

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung

Tlp. (022) 7800525, Fax. (022) 7800525

<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

iii + 98 hlm.; 25,7 cm.

Cetakan pertama, Mei 2020

Hak cipta dilindungi undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijintertulis dari penerbit.

ABSTRAK

Peta ideologi umat Islam dalam perhelatan pilpres 2019 terpolarisasi menjadi tiga kelompok, yaitu memilih basis agama, memilih dengan basis kompetensi, dan memilih secara apatis-pragmatis. Pada kelompok pertama lebih didominasi oleh pesantren-pesantren salafiyah-tradisional, pada kelompok kedua oleh pesantren modern. Sedangkan untuk kelompok ketiga lebih banyak didominasi oleh pesantren salafiyah-tradisional, terutama yang berdomisili di perdesaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa, pilihan dan peta umat Islam dalam bingkai demokrasi masih dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik yang cenderung pragmatis. Sedangkan bagi kelompok kedua, beranggapan bahwa demokrasi berasal dari Barat dan tidak dikenal dalam dunia Islam. Oleh karena itu demokrasi harus ditolak. Ketika demokrasi dimaknai pemberian suara orang per orang dalam pilpres misalnya, maka suara orang saleh akan sama nilainya dengan orang yang tidak saleh. Dalam pandangan mereka, sistem demokrasione *man one vote* tidak sesuai dengan politik luhur Islam.

Kata Kunci : Politik, Islam dan Pemilu

Kata Pengantar

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kemajuan kegiatan penelitian yang berjudul “PETA IDEOLOGI UMMAT ISLAM PADA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa)”.

Laporan kemajuan kegiatan ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Kami berharap kegiatan yang telah terlaksana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan akademik bagi civitas akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Fokus Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Berpikir	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Ideologi.....	16
2.2. Relasi Negara dan Agama	20
2.3. Demokrasi	30
2.4. Pesantren	36
BAB III METODOLOGI.....	40
3.1 Paradigma.....	40
3.2 Jenis Penelitian.....	42
3.3 Metode Penelitian.....	43
3.4 Subjek Penelitian.....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Profil Pesantren	47
4.2 Profil Informan.....	57
4.3 Hasil Penelitian	63
4.4 Posisi Politik Umat Islam Pada Pilpres 2019	63
4.5 Pemahaman Demokrasi Kalangan Pesantren di Indonesia	78
4.6 Pembahasan.....	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1. Simpulan.....	93
5.2. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, pemilihan langsung (*one man one vote*) menjadi salah satu ukuran paling *sahih* di antara banyak indikator lainnya. Secara substantif pemilihan langsung mencerminkan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, adanya kebebasan (*freedom*), di mana kebebasan merupakan inti dan hakikat dari manusia dan kemanusiaan. Dalam sejarah peradaban manusia, kebebasan senantiasa menjadi inti perjuangan terutama pada masa kolonialisme dan pemerintahan dengan sistem otoriter. Sedangkan dalam konsep politik negara demokratis, kebebasan disematkan kepada kebebasan memilih pada saat berlangsungnya pemilihan (*election*) baik pemilihan presiden (eksekutif) maupun anggota DPR/D (legislatif). Sebagai entitas yang bebas (*freedom*) setiap individu berhak menentukan pilihannya tanpa harus merasa takut ancaman dari siapapun.

Kedua, ada kerahasiaan (*secrecy*), dalam arti pilihan atau siapa yang dipilih oleh masing-masing pemilih menjadi menjadi rahasia dirinya sendiri, dan tidak seorang pun berhak mengetahui pilihan seseorang ketika berada dibalik bilik suara. Kerahasiaan dalam memilih berarti penghormatan atas sikap dan tindakan yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Namun demikian, asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

Ketiga, adanya agregasi kepentingan (*agregation of interest*), artinya pada pemilihan langsung adanya agregasi kepentingan yang bersumber dari ideologi dirinya untuk menentukan kandidat. Setiap individu pemilih

memiliki hak otonom untuk menentukan pilihannya, di mana pilihannya tersebut dipandang sebagai artikulasi kepentingan yang diinginkannya. Atas dasar hak politiknya, maka seseorang dapat menyalurkan aspirasi dan pilihannya secara bebas dan rahasia.

Harus diakui bahwa pasca pemilihan gubernur DKI Jakarta yang dimenangkan oleh Anis-Sandi menjadi “drama politik” yang paling menyedot perhatian baik di dalam negeri hingga ke luar negeri. Isu agama yang menjelma menjadi politik aliran menjadi episentrum yang menyedot banyak perhatian pengamat politik, hukum, hukum tata negara, agamawan, budayawan dan masyarakat luas. Dari waktu ke waktu politik identitas menunjukkan pertarungan ideologi yang cenderung eskalatif. Eskalativitas itu semakin kuat dengan sokongan media masaa dan media sosial (medsos) yang terbelah sehingga menyebabkan kegaduhan politik bukan saja terjadi di ruang nyata melainkan juga di ruang maya. Media massa secara sitematis telah memindahkan area pertarungan menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan melibatkan masyarakat di dunia maya. Sebagai derivasinya, kampanye hitam dan negatif tak terhindarkan yang membuat masyarakat terfragmentasi menjadi kelompok yang seolah-oleh berdap-hadapan.

Sejak reformasi 1998, di mana kebebasan menjadi ujung tombak dalam demokrasi telah merubah wajah demokrasi Indonesia yang dulu “sunyi” di bawah kooptasi rezim Orde Baru menjadi gegap gempita dan riuh rendah. Setelah kurang lebih tiga puluh dua tahun hak politik rakyat terkerangkeng dibawah demokrasi semu (*pseudo democracy*) Orde Baru, saat ini rakyat menemukan jati diri dan kebebasannya. Menurut (Takariani, 2008:60), selama empat dekade terakhir masyarakat Indonesia terbiasa diasingkan dari proses politik, kini mereka menjadi primadona, dan suara rakyat mulai menjadi suara Tuhan (*vox populi vox dei*). Adagium “koalisis

dengan rakyat” menjadi jualan partai politik yang menyadari bahwa rakyatlah yang secara nyata memegang kekuasaan.

Disadari atau tidak, percikan “api” pemilihan gubernur DKI Jakarta telah “menghangatkan” suasana dan situasi politik, bahkan jejaknya mulai menjadi titik pijar dan perhatian partai politik. Partai politik sudah mulai mengkalkulasi segmentasi yang akan menjadi target dalam pemilihan legislatif beberapa waktu ke depan di Indonesia. Partai politik mulai melakukan pemetaan melalui survey dan sejenisnya guna menentukan target perolehan suara legislatif yang akan menjadi dasar dalam pemilihan eksekutif (presiden).

Dalam garis besarnya, ideologi partai politik di Indonesia dibagi ke dalam tiga kelompok besar. *Pertama*, partai politik nasionalis yang kerap kali dinisbahkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarno Putri dan Nasional Demokrat pimpinan Surya paloh. *Kedua*, partai politik nasionalis religius, dan ini menunjuk kepada Partai Demokrat (PD) pimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Ketiga*, partai politik Islam yang disematkan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun demikian dalam realitasnya, ideologi politik (Nasionalis, Nasionalis-Religius, dan Islam) menjadi “cair”, dalam arti tidak absolut. Kiblat partai politik kerap kali berdasarkan kepentingan dan transaksional sehingga pergerakan dari Islam ke nasionalis atau sebaliknya sangat situasional. Sikap pragmatis partai politik seperti itu dapat membingungkan konstituen dan sekaligus membuat ideologi politik partai politik menjadi kabur. Masyarakat akar rumput tidak memiliki pegangan yang pasti sebagai konsekuensi rentannya perpindahan ideologi politik partai.

Inti demokrasi adalah kebebasan, yakni kebebasan mengekspresikan pilihan politik yang berbasis keyakinan (ideologi) masing-masing. Pada ruang demokrasi seperti itu pilihan-pilihan politik terikat dengan ideologi dan kepentingan-kepentingan agama. Dalam Islam misalnya, politik tidak bisa melepaskan dirinya dari doktrin agama, bahkan agama merupakan titik tolak dalam perilaku politik. Politik tidak dicitrakan sebagai kegiatan yang kotor, politik hanyalah alat dengan tujuan membumihy syariat Islam. Adalah anggapan yang keliru jika Islam tidak mengakomodasi politik. Namun politik yang dijustifikasi Islam adalah politik adiluhung, politik bernilai illahiyah yang membawa kemaslahatan umat bukan justeru perpecahan umat.

Di Indonesia, umat Islam menempati posisi mayoritas bila dibandingkan dengan pemeluk agama lain. Oleh karena itu, setiap kali perhelatan demokrasi (pilkada, pilpres) umat Islam selalu menjadi rebutan partai-partai politik. Banyak tokoh dan partai politik yang berbicara atas nama umat Islam dengan harapan dapat mengeruk suaranya demi kepentingan politik. Banyak politisi yang melakukan kunjungan dengan dibungkus oleh bahasa silaturahmi ke berbagai pondok pesantren demi mendapatkan dukungan. Ada banyak tokoh tiba-tiba muncul berbusana muslim, bicara ayat dan hadits, tampil seperti ulama atau kiyai “khos”. Intinya politik pencitraan, ingin dipersepsi memihak kepada Islam, memperjuangkan Islam dan cara-cara lainnya.

Penelitian ini akan menysasar dan memetakan ideologi politik umat Islam dalam memberikan suaranya melalui mekanisme demokrasi. Umat Islam sebagai pemilih mayoritas menjadi “seksi” untuk diperebutkan terutama oleh partai politik Islam. Dalam hitungan politik, bila partai politik mampu meraih mayoritas suara umat Islam, maka akan menjadi garansi untuk proses politik selanjutnya dalam menempati pos-pos di legislatif maupun eksekutif. Penelitian ini pun ingin memotret mengenai pandangan

umat Islam yang direpresentasikan oleh para kiyai dan santri pada pondok pesantren di Pulau Jawa tentang demokrasi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Mengingat umat Islam menjadi bidikan partai politik Islam, maka setiap partai politik Islam akan memokuskan strategi politiknya kepada pemetaan sebagai berikut: *Pertama*, menentukan kelompok sasaran umat Islam berdasarkan Islam tradisional dan Islam moderat; atau kaum nahdyyin dan kaum terpelajar. *Kedua*, bisa saja umat Islam dipecah menjadi Islam di perdesaan dan perkotaan.

1.2. Fokus Penelitian

Secara konseptual, ideologi politik umat Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan persepsi umat Islam secara ideologis dalam lingkup demokrasi. Kecenderungan itu bisa aktual ketika memberikan suaranya pada mekanisme demokrasi seperti pilpres dan pilkada. Membuat peta ideologi tentang pemahaman konseptual tentang demokrasi dikalangan pesantren di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini akan mendeskripsikan pilihan politik dan pemahaman demokrasi yang cenderung dipengaruhi kepatuhan kepada agama dan tercermin dalam pemberian suara melalui mekanisme demokrasi.

1.3. Tujuan Penelitian

Sejatinya, tujuan penelitian akan sangat terkait dengan jenis penelitian. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi dan pemahaman (vertehen) secara komprehensif mengenai ideologi politik umat Islam dalam demokrasi serta implementasinya melalui mekanisme pilpres

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan pada dua aspek penting, yaitu:

1. Kegunaan teoretik-akademik. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya dan mengembangkan ilmu komunikasi, komunikasi politik, dan ilmu politik. Memberikan pemahaman teoretik mengenai hubungan agama dan negara serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian pada penelitian serupa di masa yang akan datang.
2. Kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para politisi dan partai politik dalam menentukan strategi pemetaan konstituen. Mayoritasnya umat Islam di Indonesia menjadi pertimbangan bagi para pelaku politik untuk membuat strategi dan taktik guna sebesar mungkin memenangkan suara umat Islam.

1.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini akan dimulai dari deskripsi konsep-konsep utama yang menjadi basis penelitian. Deskripsi konsep-konsep utama ini menjadi penting guna memberikan *guide* (pedoman) dalam menentukan ontologi penelitian, *setting* dan wilayah penelitian secara utuh dan mendalam. Konsep dan teori pada penelitian kualitatif dijadikan acuan guna memahami realitas penelitian sehingga peneliti tidak liar dan tetap konsisten dengan fokus penelitian.

Secara etimologis, “ideologi” merupakan gabungan dua kata yaitu, “ideo” yang mengacu kepada gagasan dan “logie” yang mengacu kepada logos, kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy menggunakan kata ini dalam pengertian etimologinya, sebagai

"ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan". Sedangkan secara terminologis, ideologi dapat diartikan sebagai "*a system of ideas*, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya"¹.

Destutt de Tracy mengelaborasi ideologi sebagai sistem pikiran atau gagasan (ide) yang hidup pada tataran individu maupun kelompok. Ide atau gagasan merupakan titik tolak untuk melakukan aktivitas (*action*), terutama pada wilayah yang beririsan dengan politik. Oleh karena itu, sepanjang dan sejauh ini bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas politik senantiasa didasari oleh ideologi.

Sobur (2014:276), menjelaskan dalam sudut pandang komunikasi, bahwa ideologi adalah sebuah sistem ide yang diekspresikan dalam komunikasi; sistem kepercayaan dan sistem nilai serta representasinya dalam berbagai media dan tindakan sosial. Ideologi dapat didefinisikan sebagai keyakinan, sikap, dan opini yang membentuk satu kesatuan, entah secara ketat maupun longgar. Istilah ini telah digunakan dalam tiga pengertian penting: *Pertama*, merujuk kepada bentuk keyakinan tertentu; *Kedua*, merujuk kepada keyakinan yang terdistorsi atau palsu dalam beberapa pengertian; *Ketiga*, merujuk kepada serangkaian keyakinan yang meliputi segala hal mulai dari pengetahuan ilmiah, agama, hingga keyakinan sehari-hari yang berkenaan dengan perilaku yang pantas, terlepas dari benar atau salah.

Elaborasi Sobur secara eksplisit menyebutkan bahwa ideologi merupakan semacam kesadaran palsu (yang sengaja dibuat) sehingga menimbulkan keyakinan tertentu yang dikomunikasikan kepada masyarakat

¹ Lihat <https://id.wikipedia.org>. Diakses 5 April 2017.

dengan tujuan mengikat mereka untuk tujuan-tujuan tertentu. Suatu keyakinan akan semakin kuat tertanam pada jiwa seseorang atau kelompok masyarakat apabila dikomunikasikan melalui cara-cara yang baik dengan melibatkan komunikator yang terpercaya, yaitu yang memiliki dimensi ethos, pathos dan logos.

Sementara Kaelan (2010:114), merumuskan pengertian ideologi sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan dan keagamaan. Pandangan Kaelan memberikan deskripsi bahwa ideologi mencakup seluruh aktivitas manusia dengan beragam bidangnya. Meskipun pada realitasnya, ideologi kerap kali maknanya disempitkan hanya kepada persoalan politik.

Senada dengan Kaelan, Syarbaini (2011:53), menggunakan istilah ideologi dengan merujuk kepada segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau (akan) dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Ia melanjutkan, bahwa ideologi pada dasarnya adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan manusia harus hidup dan bertindak.

Tilikan Syarbaini “melemparkan” konsep ideologi sebagai acuan bertindak pada keseluruhan tindakan manusia dengan tujuan mengejar makna hidup dan kehiduoan yang bernilai. Ia menggarisbawahi bahwa tindakan-tindakan manusia baik secara individu maupun kelompok harus didasarkan atas dasar nilai. Dapat dipastikan bahwa ideologi memiliki tujuan untuk kemanusiaan dan keadilan.

Carl J. Freidrich mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dikaitkan dengan tindakan. Ideologi di dalamnya terkandung nilai yang dicita-citakan, membawa visi menuju ke masa depan, dan mengarah kepada tindakan praksis (Ghazali, 2014:92). Karl Marx (dalam

Abidin, 2014:392) menafsirkan ideologi sebagai kesadaran palsu. Karena ideologi merupakan hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemikirnya, padahal kesadaran para pemikir tersebut pada dasarnya ditentukan oleh kepentingannya (subjektif). Jadi ideologi menurut Karl Marx adalah pengandaian-pengandaian spekulatif yang berupa agama-moralitas, atau keyakinan politik. Meskipun spekulatif ideologi tersebut dianggap sebagai kenyataan untuk menyembunyikan atau melindungi kepentingan kelas sosial pemikir tersebut.

Max sebagai pejuang yang mengusung teori kelas sangat berkepentingan terhadap eksistensi ideologi, karena ideologi merupakan alat perjuangan. Dalam teori kelasnya, Max membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Selama dua kelas ini tetap eksis, maka gesekan antara keduanya akan terus berlangsung, sebab memiliki kepentingan yang berbeda. Dan Max mengatakan bahwa kesejahteraan, keadilan dan ketertiban akan tercipta bila tidak ada kelas sosial yang berbeda. Pentingnya ideologi dalam perspektif Max yaitu untuk mempersatukan mereka dengan cita-cita yang sama. Ideologi sebagai alat pengikat.

Berdasarkan beberapa pengertian di muka, maka esensi ideologi adalah seperangkat ide, gagasan, keyakinan serta nilai yang menjadi rujukan dalam berperilaku, baik dalam bidang politik, sosial, kebudayaan dan keagamaan. Ideologi menjadi pangkal tolak bagi seseorang dalam mengambil keputusan, terlepas apakah keputusan itu salah atau benar. Pengertian ini membawa implikasi kepada seseorang (individu) dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya pada ranah praksis atau lebih tepatnya pada politik praktis seperti pilpres dan pilkada.

Ideologi pada dasarnya “ciptaan” para elit sebagai alat untuk mempersatukan ide dan gagasan untuk kemudian bertindak atas dasar kredo ideologi tersebut. Ideologi dapat “membius” kesadaran individu maupun kelompok untuk bertindak secara kolektif-subjektif. Ideologi adalah alat perjuangan guna menyatukan individu-individu yang berserak untuk kemudian bersatu melawan “ideologi” lain.

Bila merujuk kepada pemikiran Marx, masyarakat (pemilih) dikreasikan oleh para ideolog atau oleh para komunikator politik untuk memiliki ideologi (kesadaran palsu) tertentu yang dapat digerakan demi kepentingan dan keuntungan individu atau sekelompok orang (partai politik). Kesadaran palsu tersebut didesakkan melalui alam pikiran sehingga tindakan politik masyarakat aktual sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak jarang dalam upaya mendesakkan kesadaran palsu tersebut kerap kali dikaitkan dengan partai berbasis ideologi tertentu bahkan agama.

Sedangkan ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan². Pemahaman atas deskripsi di atas bahwa ideologi politik pada hakikatnya sistem ide, gagasan, serta nilai yang dijadikan basis pilihan dalam praktik politik yang didalamnya terkait dengan pengaturan kekuasaan. Ideologi politik pada dasarnya adalah keyakinan seseorang dalam mendistribusikan kekuasaan melalui jalur-jalur yang legal-formal seperti pemilihan (*election*).

Pada wilayah praksis, sistem nilai yang dianut seseorang (individu) akan menjadi pijakan untuk menentukan sikap dan pilihan politik dalam ruang demokrasi yang bebas. Sikap dan pilihan seseorang bisa didasarkan

² Lihat <https://id.wikipedia.org>. Diakses 5 April 2017.

atas sistem nilai terikat dengan agama, ideologi partai politik, bahkan mungkin dikendalikan oleh kepentingan pragmatis. Dalam kalkulasi ideologis misalnya, partai politik di Indonesia dapat dibedakan menjadi berbasis ideologi Islam, nasionalis, nasionalis-demokrat, nasionalis-religius, dan lain-lain. Peta ideologi inilah yang pada gilirannya akan menjadi salah satu pilihan masyarakat pada setiap perhelatan demokrasi.

Sebagai pemilih mayoritas, umat Islam akan memegang peranan penting dalam proses demokrasi di Indonesia termasuk pemilihan legislatif dan eksekutif. Setiap orang yang dipilih oleh umat Islam harus menjadi agregator bagi kepentingan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, partai politik Islam harus mengkreasikan dirinya pada level gagasan dan ideologi yang mampu merebut hati umat Islam sehingga menjadi daya tarik dan daya tawar bagi umat Islam itu sendiri.

Pada konteks pemilihan (*election*), pemilih (*voters*), diartikan sebagai individu-individu yang secara ketentuan undang-undang memiliki hak untuk memilih (menentukan) pilihannya dalam satu pemilihan, seperti pemilihan gubernur, bupati, wali kota, eksekutif dan legislatif. Secara teoretik, pemilih dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *supporters* dan *voters*.

Supporters ditandai oleh hal-hal berikut: (1) loyalitas sentimental, yakni memilih berdasarkan faktor budaya dan ideologis, (2) emosional-rasional, memilih berdasarkan ikatan emosional bukan untung-rugi terhadap pilihannya, (3) kultus, (4) pengabdian, rasa sungkan, kepatuhan, (5) memilih berdasarkan beberapa variabel, seperti penampilan fisik, popularitas, status sosial, pendidikan, dan garis keturunan, (6) memilih hanya sekedar dukungan tanpa kepentingan politik apapun, (7) memilih hanya mewakilkan (*delegate*) calon tertentu saja tanpa disertai harapan apapun (politik cek kosong), (8) mobilisasi dengan imbalan tertentu dan tidak memadai, dan (9) memilih karena marah, kecewa terhadap calon lain.

Sedangkan *voters* (pemilih yang baik) memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) kalkulasi, yakni memilih dengan penuh perhitungan sehingga mengetahui dari untung-rugi pilihannya, (2) rasional, yaitu memilih berdasarkan tingkat kapabilitas calon dan aneka program yang ditawarkan, (3) penuh pertimbangan dengan melihat aneka informasi mengenai *track record* dan kapasitas seorang calon, (4) transaksi sebelum memilih dengan mengajukan pertanyaan kritis, apakah calon dapat mewujudkan harapannya, (5) memandang calon secara setara, (6) bertanggung jawab atas pilihannya, dan (7) memberikan mandat pada calon, berpartisipasi aktif dan selalu melawan terhadap arus negatif (Suciska, 2008:2).

Sementara itu, Firmanzah (2008:120-124), membagi tipologi pemilih kepada empat kelompok besar. *Pertama*, pemilih rasional (*rational voter*). Para pemilih dalam kelompok ini lebih berorientasi kepada ‘policy-problem-solving’ dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Kelompok ini umumnya lebih mempertimbangkan kemampuan kandidat dalam program kerjanya yang tercermin pada kinerja masa lampau dan tawaran untuk menyelesaikan permasalahan nasional yang ada.

Kedua, pemilih kritis, yakni mereka yang memadukan antara kemampuan kandidat dalam menyelesaikan beragam persoalan dengan hal-hal yang bersifat ideologis. Mereka yang berada pada kelompok kritis ini akan selalu menganalisa kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakannya yang dibuat. Tiga kemungkinan yang akan muncul bila terjadi perbedaan antara ideologi dan ‘platform’ partai: (1) memberikan kritik internal, (2) frustrasi, dan (3) membuat partai baru.

Ketiga, pemilih tradisional, yakni mereka yang memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai atau kandidat sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan kebijakan.

Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran dalam menentukan pilihan.

Keempat, pemilih skeptis, yakni mereka yang tidak memiliki orientasi ideologis tinggi dengan kandidat, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Golongan putih (golput) merupakan kelompok yang paling didominasi oleh pemilih skeptis ini. Mereka umumnya tidak peduli atas realitas politik yang berlangsung.

Dari kedua pendapat mengenai ideologi pemilih dalam menentukan sikap dan pilihannya memiliki kemiripan substansi meskipun dibedah dalam cara yang berbeda. Hemat penulis, pendapat Firmanzah dipandang lebih sistematis dan simpel sehingga dapat dijadikan sebagai landasan konseptual yang kokoh guna memahami realitas serta *setting* penelitian ini.

Secara teoretik, ideologi politik pemilih dapat dijelaskan melalui teori kedaulatan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan. Teori ini pula yang dalam perkembangan sejarah politik dunia melahirkan teori demokrasi. Demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan dan politik manusia. Rakyat menjadi sentral (pusat) kekuasaan yang kemudian didistribusikan melalui mekanisme yang berlaku pada suatu negara seperti pemilihan umum (Winarno, 2013:98).

Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pemaknaan yang terus berkembang di kalangan para ahli. Joseph A. Schmitter menuturkan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atau suara rakyat. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusannya yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari warga negara dewasa. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, Philipp C. Schmitter

mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih (Ubaedillah, 2013:66).

Merujuk kepada beberapa pemikiran di muka, esensi demokrasi terletak pada kedaulatan rakyat yang melalui mekanisme tertentu kedaulatan tersebut dipindahkan kepada individu-individu melalui mekanisme pemilihan (*election*) atau kompetisi yang berdasarkan perundang-undangan yang ada. Pada ranah seperti itu, maka hakikat demokrasi adalah: (1) *government of people*, (2) *government by people*, dan (3) *government for the people*.

Di sisi lain, fenomena pemilihan seperti pemilihan legislatif dapat dijelaskan melalui teori kontrak sosial. Sejatinya, teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Zaman Pencerahan (*enlightenment*) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Manusia ditempatkan sebagai aktor dan faktor utama dalam ruang demokrasi yang semakin terbuka dan kompetitif. Kondisi itu pula yang menyediakan ruang bagi partai politik Islam dalam menentukan ideologi politiknya sehingga kemudian menjadi daya tawar bagi para pemilih. Meskipun pemilih mayoritas beragama Islam, tetapi pada tataran praksisnya umat Islam terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan basis pemahaman keislaman yang berbeda-beda. Pada tulisan sosiologis-antropologis misalnya, Clifford Geertz membagi umat Islam dalam trikotomi abangan, santri, dan priyayi.

Teori kontrak sosial menempatkan manusia sebagai sumber kewenangan dalam mengelola kehidupan politik bernegara. Hobbes, Locke dan Rousseau sama-sama berangkat dari, dan membahas tentang,

kontrak sosial dalam analisis-analisis politik mereka. Mereka sama-sama mendasarkan analisis-analisis mereka pada anggapan dasar bahwa manusialah sumber kewenangan. Akan tetapi tentang bagaimana, siapa mengambil kewenangan itu dari sumbernya, dan pengoperasian kewenangan selanjutnya, mereka berbeda satu dari yang lain. Perbedaan-perbedaan mendasar itu satu dengan yang lainnya, tercermin baik didalam konsep maupun di dalam praksisnya.

Teori kedaulatan dan kontrak sosial sama-sama menempatkan manusia sebagai sentral (pusat) dalam gerak politik. Manusia sebagai subjek dan objek politik melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang suatu negara. Pemilihan legislatif merupakan perwujudan teori kedaulatan dan kontrak sosial melalui mekanisme pemilihan jujur, adil dan rahasia, dimana rakyat memberikan kedaulatannya kepada kepada individu yang terpilih. Di sisi lain, rakyat juga memberikan kontrak sosial atau kontrak politik selama lima tahun, dan setelahnya akan dilakukan pemilihan kembali berdasarkan mekanisme yang berlaku. Kinerja anggota legislatif serta partai politik akan menjadi referensi pada pemilihan yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam setiap penelitian (*research*), kajian pustaka menjadi dasar dalam memahami realitas atau *setting* penelitian. Para peneliti kualitatif akan menggali secara komprehensif beragam konsep dan teori sebagai “bekal” untuk memasuki wilayah penelitian. Kajian pustaka (literatur) berfungsi: (1) Menentukan dan membatasi permasalahan penelitian; (2) Menghindari replikasi yang tidak disengaja dan tidak perlu. Replikasi yang tidak sengaja terhadap penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti perlu dihindari karena hanya merupakan pemborosan; (3) mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan; dan (4) menghubungkan penemuan dengan pengetahuan yang ada dan usulan untuk penelitian lebih lanjut.

2.1 Ideologi

Terminologi ideologi berasal dari kata “idea” (Inggris) yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan “logi” diambil dari Bahasa Yunani “logos” yang memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, ideologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, *science of ideas*, atau pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat dasar. Bila dikaitkan dengan lingkup bangsa dan negara, maka ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2014:517), menjelaskan terminologi (istilah) ideologi dalam konteks politik dalam dua aspek. *Pertama*, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. *Kedua*, cara berpikir seorang atau suatu golongan.

Pengertian terminologis kamus tersebut merujuk kepada asas, yang dimana asas itu dijadikan sebagai cara berpikir baik bagi individu maupun golongan. Bila eksistensi ideologi itu dijadikan sebagai tindakan golongan, maka ideologi sebagai alat pengikat atau pemersatu. Sebagaimana eksistensi negara-negara di dunia, maka ideologi berfungsi sebagai pedoman negara. Ideologi bersifat mengikat, menimbulkan kesadaran dan kebersamaan meskipun diciptakan atas subjektivitas dan kepentingan para elit.

Menurut Kaelan (2015:32), ideologi adalah suatu perangkat prinsip pengarahan (*guiding principle*) yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi memiliki sifat futuristic, artinya mampu memberikan suatu gambaran masa depan yang ideal. Dengan lain perkataan ideologi merupakan suatu konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam suatu kehidupan yang nyata.

Ideologi dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat ide yang membentuk keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita manusia. Kata ideologi disusun atas “*ideo*” yang artinya ide, cita-cita, melihat, memandang, dan “*logie*” yang artinya logika atau rasio. Di sini, ideologi adalah seperangkat gagasan (ide) sebagai alat untuk melihat realitas dari berbagai aspek. Ideologi berada pada alam pikiran yang tidak akan pernah mati sepanjang manusia ada.

Beberapa pakar mendefinisikan ideologi sebagai berikut:

1. Francis Bacon

Menurut Francis Bacon, pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup.

2. Alfian

Menurut Alfian, pengertian ideologi adalah sebuah pandangan ataupun sistem nilai yang menyeluruh dan juga mendalam mengenai bagaimana cara yang sebaiknya, yakni secara moral dianggap benar dan juga adil, mengatur tingkah laku bersama dalam beragam segi dan bidang kehidupan.

3. Gunawan Setiardjo

Menurut Gunawan Setiardjo, arti ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau aqidah 'aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan.

4. C. C. Rodee

Menurut C. C. Rodee, pengertian ideologi adalah sekumpulan ide yang secara logis berkaitan dan mengindentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan juga pelakunya.

5. Ali Syariati

Menurut Ali Syariati, pengertian ideologi adalah suatu keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau ras tertentu.

Sejatinya ideologi itu bersifat abstrak namun mampu menggerakkan para pengikutnya untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan tujuan perjuangannya. Ideologi memberi kerangka teoretik yang menjadi pedoman dalam aksi nyata di lapangan. Tentu saja dalam praksisnya, ideologi memiliki para ideolog yang memegang teguh prinsip-prinsip perjuangan berbasis ideologi.

Para pakar membagi fungsi ideologi menjadi tiga bagian, yaitu ideologi sebagai sistem kepercayaan yang diusung oleh Martin Seliger; ideologi sebagai proyeksi nasional yang dikembangkan oleh Alvin Gouldner; dan ideologi sebagai relasi sosial yang diusung oleh Paul Hirst. Pendapat lain mengemukakan bahwa ideologi berfungsi sebagai:

1. Struktur kognitif
2. Orientasi dasar
3. Norma-norma yang menjadi pedoman
4. Jalan untuk menentukan identitas diri
5. Kekuatan untuk mencapai tujuan
6. Sumber edukasi bagi masyarakat.

Pada penelitian ini, peta ideologi yang dimaksud untuk memberikan analisa terhadap sikap dan pilihan politik umat Islam yang diwakili oleh kalangan pesantren. Pertimbangan pesantren sebagai fokus dan lokus penelitian ini didasarkan atas eksistensi pesantren sebagai institusi yang berpengaruh pada masyarakat. Pesantren memiliki jamaah yang cukup besar dan kedudukan kiyai pada pesantren menjadi panutan bagi jamaahnya. Kerapkali apa yang dikatakan kiyai menjadi rujukan bagi jamaahnya. Kiyai diproyeksikan sebagai manusia yang memiliki kedalaman ilmu agama, dan kerenanya sebagai individu yang kerapkali dimintai pendapat dan nasihatnya.

Acapkali, gerakan-gerakan politik pada suatu kelompok masyarakat memperjuangkan ideologi tertentu, sebab ideologi menjanjikan sesuatu yang dianggap dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik pada berbagai aspek dan bidang kehidupan. Misalnya, ideologi Pancasila akan membawa arah kehidupan berbangsa bersendikan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sosial. Ideologi Pancasila “menjanjikan” kehidupan yang berkadil dan kesejahteraan. Doktrin itu diyakini, dioerjuangkan dan

dijaga oleh para pengikutnya. Tindakan-tindakan nyata pada dasarnya meruakan refleksi dari ideologi yang dianutnya. Seorang komunis akan memperjuangkan nilai-nilai serta ideologi komunis, pun seorang Pancasilais akan mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya.

Gerakan politik yang dilatarbelakangi oleh ideologi cenderung menimbulkan kelompok militan dan memiliki visi serta misi yang jelas. Ini akan berbeda dengan gerakan politik yang tidak berlatar ideologi, gerakannya akan cenderung “rapuh” dengan tujuan-tujuan yang dangkal. Misalnya hanya sekedar mengejar kedudukan, uang serta hal-hal yang sifatnya pragmatis. Dalam kisah manusia dan kemanusiaan banyak orang yang mati membela ideologi, membela keyakinan, dan membela gagasan. Ideologi dapat dikatakan semacam “agama”, di mana orang sanggup berkorban dan mengorbankan dirinya.

2.2. Relasi Negara dan Agama

Wacana tentang negara dan agama, khususnya gerakan Islam sebagai ideologi yang harus mewujud dalam praktik bernegara telah berlangsung sejak lama. Dalam konteks Indonesia misalnya, Hasrat mendirikan negara Islam atau Islam sebagai ideologi negara telah di mulai oleh Gerakan NII/TII dengan pentolannya Karto Suwiryo. Meskipun Gerakan ini secara faktual telah gagal, namun para simpatisannya terus masih memiliki romantisme yang dalam. Munculnya Gerakan-gerakan sempalan yang didasari doktrin agama sebagai bukti sah bahwa ideologi untuk mendirikan negara Islam masih tumbuh dan berkembang.

Diskursus mengenai hubungan negara dengan agama tetap menarik sepanjang masa. Suatu isu yang tidak pernah mati. Suatu gagasan yang selalu aktual dan terus diaktualkan oleh kelompok-kelompok tertentu, karena di dalamnya ada pengikut fanatik yang siap menjadi “martir” atas nama

ideologi. Sistem gagasan ini hidup dalam diri seseorang atau kelompok orang dan menjadi faktor penggerak yang terus hidup sepanjang masa.

Apalagi Indonesia merupakan negara yang multi religi (multi agama). Interaksi negara dan agama, khusus dalam kasus agama Islam. Hubungan keduanya masih menjadi perdebatan panjang dan intensif dikalangan para pakar muslim. Sebagaimana dikatakan Azyumardi Azra, yang ditulis Ubaedillah & Abdul Rojak (2013: 31-34), Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, mengatakan, "perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan masih berlangsung hingga dewasa ini." Karena menurut Azra, ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dalam Islam disulut oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*).

Tafsir atas hubungan agama dan negara sangat beragam dengan mengedapankan berbagai argumentasi yang relatif kuat. Pada konteks tafsir setiap orang atau golongan bisa berbeda pendapat, karena tafsir sifatnya relatif. Situasi akan menjadi bahaya dan mencekam bila tafsir kemudian menimbulkan gerakan nyata di masyarakat. Situasi di mana terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam meruoakan refleksi tafsir yang berbeda dan berakhir pada tindakan.

Berbagai eksperimen telah dilakukan untuk menyelaraskan antara *din* dan *dawlah* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Seperti halnya percobaan demokrasi di sejumlah negara di dunia, penyelarasan *din* dan *dawlah* dibanyak negara muslim telah berkembang secara beragam. Perkembangan wacana demokrasi dikalangan negara-negara muslim dewasa ini semakin menambah marak perdebatan Islam dan Negara. Gerakan-gerakan yang dibungkus oleh paham agama menjelma seperti Al-Qaida, ISIS dan lain-lain. Sementara di Indonesia munculnya berbagai aliran sempalan

seperti Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), dan lain-lain. Pada dimensi praksis, munculnya politik aliran yang didasarkan atas ideologi agama tertentu (Islam) telah memberi warna dan wacana di Indonesia. Meskipun banyak ditentang oleh aliran nasionalis, namun keberadaannya masih tetap eksis.

Perdebatan Islam dan negara berangkat dari pandangan dominan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh (*syumulī*), yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari pandangan Islam sebagai agama yang komprehensif ini, pada dasarnya dalam Islam tidak terdapat konsep pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*dawlah*). Arguemntasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di kota hijrah ini, Nabi Muhammad SAW berperan ganda, sebagai seorang pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara yang memimpin sebuah sistem pemerintahan awal Islam yang oleh kebanyakan pakar dikatakan sangat modern dimasanya.

Posisi ganda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah disikapi beragam oleh kalangan ahli. Secara garis besar perbedaan pandangan ini bermuara pada apakah Islam identik dengan negara, atau sebaliknya Islam tidak meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk negara, mengingat sepeninggal Nabi Muhammad SAW tidak seorang pun dapat menggantikan peran ganda beliau, sebagai pemimpin dunia yang sekuler dan si penerima wahyu Allah sekaligus.

Menyikapi realitas perdebatan tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa posisi nabi saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (Al-Quran) bukan sebagai penguasa. Menurut Ibnu Taimiyah, walaupun ada pemerintahan, itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama itu sendiri. Dengan

ungkapan lain, politik dan negara dalam Islam hanyalah sebagai alat bagi agama, bukan eksistensi dari agama Islam.

Pendapat ini bersandar pada ayat Al-Quran (QS.57:25) yang artinya:
”*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami yang disertai keterangan-keterangan, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan agar manusia berlaku adil, dan Kami turunkan besi, padanya ada kekuatan yang hebat dan manfaat-manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan menolong Rasul-Nya yang ghaib (daripadanya).*”

Sehingga Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa agama yang benar wajib memiliki buku petunjuk dan “pedang” penolong. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang mutlak bagi agama, tetapi kekuasaan itu bukanlah agama itu sendiri. Adapun politik tidak lain sebatas alat untuk mencapai tujuan-tujuan luhur agama.

Di Indonesia, pandangan yang mirip dengan Ibnu Taimiyah diwakili oleh pemikiran M. Natsir. Natsir mengemukakan:

Bagi Natsir, negara bukankah tujuan, negara hanyalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu kesempurnaan berlakunya undang-undang Illahi. Karena itu, Islam sebagai tolok ukur pemikiran politik bukan sekedar berlakunya secara formal Islam sebagai dasar negara, tetapi yang lebih penting adalah berlakunya nilai-nilai Islam di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Natsir, 2014:28).

Hubungan Islam dan negara modern secara teoritis dapat diklasifikasikan kedalam tiga pandangan: Integralistik, Simbiotik, dan Sekularistik.

Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Paradigma ini mengandung paham/konsep agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Pada paham ini juga memberikan penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama (*din*) dan politik atau negara (*dawlah*).

Dalam pergulatan Islam dan negara modern, pola hubungan integratif ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik identik dengan paham *ad-Din wa dawlah* (Islam sebagai agama dan negara), yang sumber hukum positifnya adalah hukum Islam (syariat Islam). Paradigma integralistik ini antara lain dianut oleh Negara Kerajaan Saudi Arabia dan penganut syi'ah di Iran. Kelompok pencinta Ali r.a. ini menggunakan istilah *Imamah* sebagai dimaksud dengan istilah *dawlah* yang banyak dirujuk kalangan Sunni.

Pandangan yang tidak memisahkan antara agama dan politik (negara) dikemukakan oleh Hasan Al-Bana, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, dan A.A. Al-Maududi. Mereka berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain system ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada system

ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu bahkan jangan meniru ketatanegaraan Barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin (Sjadjali, 1993:1).

Pandangan politik ini memberikan tekanan bahwa Islam dengan seluruh nilai-nilainya sebagai pedoman bernegara, bukan saja hanya untuk urusan ibadah. Islam mengandung aturan untuk melakukan peribadatan kepada Allah, dan di sisi lain, Islam pun mengatur bagaimana cara-cara mengelola negara (politik). Islam disebut sebagai agama yang lengkap (paripurna).

Paradigma Simbiotik

Menurut pandangan simbiotik, hubungan agama dan negara berada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (simbiosis mutualisma). Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen (alat) dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spiritualitas warga negaranya.

Paradigma simbiotik tampaknya bersesuaian dengan pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara sebagai alat agama diatas. Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak akan berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradig ini tidak saja berasal dari adanya kontrak sosial (*social contract*), tetapi bisa diwarnai oleh hukum agama (*syariah*). Dengan kata lain, agama tidak mendominasi kehidupan bernegara,

sebaliknya ia menjadi sumber moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Model pemerintahan Negara Mesir dan Indonesia dapat digolongkan kepada kelompok paradigma ini.

Tokoh yang menempatkan agama sebagai sumber nilai bagi keberkangsungan tata kenegaraan diusung oleh Mohammad Husein Haikal. Aliran ini mengemukakan, bahwa: “dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara” (Sjadjali, 1993:2).

Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara.

Negara dalam pengertian paradigma ini sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh Barat, yakni tidak ada hubungan antara agama dan negara (sekuler). Menurut penganut paradigma sekularistik ini, bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul dengan tugas mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia, tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara (Sjadzali, 1993:1).

Pengalaman negara dan agama Islam di Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Uniknya, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Dari keunikan ini perdebatan pola hubungan Islam dan negara di Indonesia merupakan perdebatan politik yang tidak kunjung selesai. Perdebatan tentang Islam dan nasionalisme Indonesia antara tokoh nasionalisme muslim dan nasionalis sekuler 1920-an merupakan babak awal pergumulan Islam dan

negara pada kurun-kurun selanjutnya. Perdebatan Islam dan nasionalisme— dan konsep negara sekuler diwakili masing-masing oleh nasionalis muslim Mohammad Natsir, dan Soekarno dari kelompok nasionalis sekuler.

Menurut Ubaedillah & Abdul Rojak (2013: 135-137), Pendidikan Kelewarganegaraan (*Civic Education*) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani mengatakan, bahwa perdebatan Islam dan konsep-konsep ideologi sekuler menemukan titik klimaks pada persidangan formal dalam sidang-sidang Majelis Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bentukan pemerintah Jepang, 1945. Para tokoh muslim seperti H. Agus Salim, KH. Mas Mansyur, dan KH Wahid Hasyim, menyuarakan suara aspirasi Islam dengan mengajukan usul konsep negara Islam dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara bagi Indonesia merdeka. Usulan ini bersandar pada alasan sosiologis bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk Islam sebagai agama dan keyakinannya.

Alasan kelompok nasionalis Muslim ini ditentang oleh kalangan nasionalis sekuler yang mengajukan konsep negara sekuler. Menurut para nasionalis sekuler, kemajemukan Indonesia dan perasaan senasib melawan penjajah mendasari alasan mereka menolak konsep negara agama (Islam) yang diajukan oleh kalangan nasionalis muslim. Bagi mereka, Indonesia yang majemuk baik agama, suku, dan bahasa harus melandasi berdirinya negara non-agama (sekuler). Pada kesempatan perhelatan konstitusional ini, tokoh nasionalis sekuler Soekarno merujuk pengalaman Turki Modern dibawah Kemal Ataturk dengan konsep negara sekulernya. Lebih lanjut, Soekarno kembali menyerukan konsep sekulernya tentang lima dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal Pancasila.

Tentu saja paham kebangsaan Pancasila tidak mudah diterima oleh kelompok nasionalis muslim. Bagi mereka selain alasan mayoritas penduduk Islam memeluk Islam, Islam agama ciptaan Allah yang bersifat universal dan

lengkap harus dijadikan dasar dalam tata kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. Akhir dari perdebatan konstitusional BPUPKI menghasilkan kekhawatiran bagi kelompok nasionalis dari kawasan Indonesia Timur. Kekhawatiran mereka diwujudkan melalui keinginan mereka menidirikan negara sendiri dengan memisahkan diri konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman pemisahan diri dari konsep NKRI melahirkan kekhawatiran dari semua kelompok nasionalis yang tengah berdebat tentang masa depan Indonesia. Namun demikian, dibalik sengitnya perdebatan tentang dasar dan bentuk negara, terjadi kesepakatan atau kompromi politik di kalangan tokoh-tokoh nasionalis baik muslim maupun sekuler.

Klimaks dari sidang BPUPKI berakhir dengan kesediaan kalangan nasionalis muslim untuk tidak memaksakan kehendak mereka menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Demi persatuan dan kesatuan terselenggarakannya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah, mereka menerima konsep kalangan nasionalis sekuler, dengan catatan negara menjamin dijalankannya syariat Islam bagi pemeluk Islam di Indonesia. Hasil dari kompromi antara kelompok nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler dikenal dengan nama *the gentlemen agreement* yang tertuang dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang menyebutkan negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Setelah Indonesia merdeka, hubungan Islam dan negara dibawah kepemimpinan Soekarno kembali mengalami ketegangan. Sumber ketegangan itu berpusat pada perdebatan seputar tafsir klausul Sila Pertama Pancasila, ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.” Alotnya perdebatan tersebut berakhir pada pemahaman dikalangan tokoh

nasional bahwa NKRI adalah bukan negara agama (Islam) dan juga negara sekuler.

Berikut catatan singkat pergumulan Islam dan Negara Indonesia: Pada kurun 1950-1959, ketika Indonesia menjalankan prinsip Demokrasi Parlementer, ketegangan Islam dan negara kembali terulang dalam bentuk perseteruan sengit antara kelompok partai politik Islam, seperti Partai Masyumi dan Partai NU, dengan partai politik sekuler; Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan sebagainya. Perseteruan Ideologi Islam versus Ideologi sekuler terjadi dalam persidangan konstituante hasil pemilu demokratis yang pertama 1955.

Lintasan sejarah yang penuh perdebatan tentang posisi umat Islam di Indonesia tidak lantas selesai begitu saja, tetapi terus bergulir hingga saat ini. Ada beberapa kalangan seperti yang diwakili Al-Chaidar, bahwa imbas perjuangan umat Islam pasca kemerdekaan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara tidak pernah padam. Hanya saja tipologi perjuangannya mengakami perubahan sesuai dengan situasi sosial dan politik yang berkembang saat ini.

Jadi, jika saat ini masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk membentuk negara Islam, atau ingin “membunuh” demokrasi sebagai ajaran yang menyimpang dari syariat Islam merupakan kesinambungan pergulatan Islam di masa awal-awal kemerdekaan. Dampaknya, tiap kali perhelatan pilpres dan pilkada gerakan-gerakan yang bernuansa agama (Islam) kerap kali muncul ke permukaan.

Bila dilihat dari aspek historis dan aktualisasinya, maka gerakan-gerakan yang menginginkan agama sebagai dasar negara atau agama sebagai ideologi negara tidak akan pernah surut, bahkan mungkin semakin kencang. Gerakan ini semakin kuat dan memberikan kesadaran kepada masyarakat dikarenakan lemahnya partai politik Islam dalam mengagregasi kepentingan

umat Islam. Partai-partai Islam yang selama ini tumbuh dan berkembang belum dapat mewakili hati nurani umat Islam. Umat Islam saat ini memandang partai-partai Islam terjebak dalam kepentingan sesaat, yakni berkuat pada pembagian kekuasaan, menginginkan jabatan publik, bahkan cenderung pragmatis dan hedonis.

Idelanya, tumbuhnya partai-partai berbasis Islam mampu merebut hati rakyat yang gandrung akan kehadiran agama dalam tata kelola kenegaraan, atau sekurang-kurangnya partai-partai Islam mampu menangkap aspirasi umat Islam dan mewujudkannya dalam praktik bernegara. Namun kenyataannya, partai-partai Islam saling berebut konstituen hanya untuk kepentingan partai saja. Ketika sudah duduk dan berkuasa rakyat (umat Islam) ditinggalkan, bahkan mencederai umat Islam sendiri.

2.3. Demokrasi

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaahan tentang demokrasi dalam berbagai aspeknya. Menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (2013:34), ada dua alasan yang menjadi latar belakang meluasnya demokrasi, yaitu: *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dalam penyelenggaraan negara. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Pada sistem demokrasi, rakyat sebagai entitas yang merdeka diberikan haknya, diakui dan diberikan tempat tertinggi sebagai pemegang kekuasaan. Konsep kekuasaan rakyat ini yang menarik dikaji sepanjang zaman oleh puluhan filosof dan ilmuwan. Aristoteles mengatalan bahwa di dalam politik demokratis, negara bergerak di dalam kerangka prinsip

kesetaraan antara manusia. Manusia didudukan secara egaliter, setara, dan memiliki hak yang sama.

Meskipun implementasi demokrasi dibeberapa negara berbeda dengan negara-negara lainnya, tetapi menurut penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan bahwa “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh.

Di Indonesia, eksistensi demokrasi semakin menguat seiring dengan digelarnya pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres), di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasi atau suaranya secara langsung dalam memilih pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati/walikota, dan presiden. Pilihan terhadap pimpinan daerah dan negara tersebut dilangsungkan dengan suasana LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Secara politik apa yang terjadi saat ini di Indonesia merupakan loncatan besar dalam demokrasi dan politik, dan menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Ada puladefinisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Wahidin (2010:321), menyebut demokrasi dengan penjelasan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat.

Menurut Adolf Heuken, dkk (1988), kata *demokrati* ini muncul di Yunani Kuno (abad ke-5 sebelum masehi), untuk menamai suatu bentuk pemerintahan di negara kota Athena. Lebih lanjut Heuken menjelaskan bahwa “*demos*” atau rakyat dalam suatu negara itu tidak sama dengan

penduduk. Sebab di alam demokrasi langsung Yunani Kuno, yang dimaksud dengan *demos* itu hanyalah sebagian dari penduduk dewasa kota Athena. Analoginya sama seperti dalam kehidupan negara demokrasi modern juga tidak seluruh penduduk dalam suatu negara berhak ikut memerintah negara yang bersangkutan. Dalam pemilu misalnya, hanya warga negara dewasa yang memenuhi syaratlah yang diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih mereka. Jadi sejak zaman Yunani Kuno sampai sekarang sebenarnya selalu ada penduduk yang tidak masuk dalam pengertian *demos* atau rakyat yang berdaulat karena tidak memenuhi persyaratan tertentu (Dwiyatmi, 2012:153).

Untuk lebih memberikan pemahaman demokrasi secara luas dan mendalam, berikut ini pendapat beberapa ahli:

Harris Soche menyatakan:

“Demokrasi adalah bentuk pemerintah rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah”

Henry B.Mayo, menyatakan:

“Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”

Menurut International Commission of Jurist:

“Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.”

C.F.Strong mendefinisikan demokrasi sebagai:

“Suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung wabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu”.

Samuel Huntington menyatakan:

“Demokrasi terjadi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.”

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) dalam kehidupan bernegara.

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut:

1. *Kesadaran akan pluralisms.* Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya.

2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antaranggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.
5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antarwarga negara, didasari sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.

Kalangan-kalangan yang berhaluan “Islam garis keras” cenderung menolak demokrasi sebagai sendi dasar dalam praktik bernegara. Mereka mempertanyakan konsep yang disebut “satu orang satu suara”, karena akan mereduksi nilai-nilai yang membedakan orang per orang. Misalnya, bagaimana mungkin seorang yang saleh dalam beribadah akan memiliki suara yang sama dengan pendosa. Ini yang kemudian menjadi dasar dan argumentasi bahwa sistem demokrasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Cara berpikir seperti ini pula yang membuat bahwa pemimpin negara harus dipilih oleh semacam dewan syuro.

Namun pada tataran implementasinya, Gerakan yang ingin “merubah” praktik bernegara ini tidak cukup kuat. Bahkan gerakan mereka yang memilih “jalan kekerasan” bersifat kontra produktif dan membuat stigma buruk di masyarakat. Gerakan-gerakan yang mengusung kekerasan ini akan mudah dipatahkan oleh aparat negara, bahkan masyarakat menstigma mereka sebagai kelompok anti kemanusiaan.

Pada posisi seperti itu, umat Islam suka tidak suka harus ikut dalam permainan demokrasi dan berpartisipasi dalam setiap helatan demokrasi seperti pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Kendaran politik (parpol) yang digunakan adalah partai-partai yang berbasis Islam meskipun sejauh ini masih jauh dari harapan. Ini pada satu sisi menjadi dilema. Artinya, tidak ikut “bermain” kalah, dan ketika ikut bermain berada pada kendaraan politik yang “nyaris roboh”.

Jika ditelaah lebih dalam, maka esensi dari demokrasi adalah gagasan tentang kebebasan (*freedom*). Kebebasan yang dimaksud tercermin dalam kebebasan beroendapat, berserikat, menentukan pilihan, dan hak-hak dasar manusia lainnya. Dalam konteks pilpres misalnya, setiap orang (individu) diberikan kebebasan dan harus terbebas dari rasa takut, intimidasi dan lain-lain. Setiap individu diberikan kebebasan dalam mengekspresikan pilihannya berdasarkan pandangan ideologinya sendiri.

2.4. Pesantren

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014:1064), pesantren diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Pengertian lain, Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku³.

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata "santri" yang mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata "santri" (manusia baik) dengan suku kata "tra" (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik.

Untuk memberikan cakrawala yang lebih luas tentang pengertian pesantren, berikut ini pendapat para ahli. Pondok pesantren adalah lembaga

³Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren>

pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

1. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.
2. Pondok pesantren adalah pendidikan dan pengajaran Islam di mana di dalamnya terjadi interaksi antara kiai dan ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Dengan demikian, unsur terpenting bagi pesantren adalah adanya kiai, para santri, masjid, tempat tinggal (pondok) serta buku-buku (kitab kuning).
3. Pesantren sebagai lembaga tafaqquh *fi al-dîn* yang mengemban misi meneruskan risalah Muhammad SAW sekaligus melestarikan ajaran Islam yang berhaluan Ahlu al-sunnah wa al- Jamā'ah 'alā Tarîqah al-Mazāhib al-'Arba'ah.
4. Pondok pesantren adalah lembaga tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (tafaqquh *fi al-dîn*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari.
5. Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (*leadership*) seorang atau beberapa

orang kiyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal.

Dalam penjelasan Irawan (2018:52), pesantren atau lebih dikenal pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang memiliki kaitan penting dengan tradisi pengajaran keilmuan di bumi pertiwi (Indonesia). Penyebutan istilah tradisional mengandung pengertian bahwa lembaga ini hidup sejak rausan tahun lalu dan telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar umat Islam di Indonesia.

Dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, pesantren berfungsi dalam beberapa hal, yaitu: (1) sebagai lembaga pendidikan, (2) sebagai lembaga sosial, dan (3) sebagai lembaga dakwah. Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim tanpa membedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu.

Sedangkan fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta'lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum (Rivauzi, 2007).

Dalam perkembangan selanjutnya, peran pesantren tidak bisa dilepaskan dari pergumulan politik di Indonesia, sejak zaman penjajahan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pesantren yang memiliki basis masa jutaan hingga belasan juta menjadi modal sosial dalam sistem demokrasi yang menggunakan pemilihan langsung. Pada akhirnya, pesantren menjadi bahan “rebutan” tokoh-tokoh politik menjelang pilpres dan pilkada dalam rangka mendulang suara. Secara langsung maupun tidak langsung pesantren dan kiyai banyak terjun ke arena politik dengan memberikan dukungan kepada para kandidat.

Sejatinya, masuknya pesantren ke arena politik menjadi “pro dan kontra” yang membuat masyarakat terbelah. Mereka yang pro berasumsi bahwa pesantren harus “mewarnai” praktik politik dan tidak membiarkan Gerakan politik lepas dari aspek moral. Pada tataran ini kehadiran pesantren dan para kiyai diharapkan sebagai pilar-pilar moral sehingga politik tidak lagi buta dan membabi buta. Politik adalah alat, dan karena politik adalah alat, maka alat harus digunakan dalam kepentingan agama dan kemanusiaan. Sedangkan kelompok yang kontra menginginkan pesantren dan kiyai tidak terjun ke dalam dunia politik praktis, sebab dalam kenyataannya banyak pesantren dan kiyai yang hilang kewibawaannya. Bila seorang kiyai telah masuk dan terperangkap ke dalam politik praktis cenderung menjadi “abu-abu”.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Paradigma

Paradigma dikatakan sebagai cara pandang, atau pandangan dunia (*world view*), cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran atau pun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang rumit (*complicated*). Gubamengartikanparadigma sebagai sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia.

Penelitian tentang ideologi partai politik Islam ini berada pada ranah ilmu sosial. Menurut para ahli, paradigma ilmu sosial dibagi ke dalam lima bagian, yaitu: (1) Positivistic, (2) Post Positivistic, (3) Critical Theory, (4) Constructivism, dan (5) Postmodernism. Creswell (2002:3) mengemukakan bahwa pada ranah penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivis atau naturalistis.

Bila menilik dari kelima paradigma tersebut, maka penelitian ini dipandang relevan menggunakan paradigma konstruktivisme. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan mengenai relevansi penelitian ini dengan paradigma konstruktivisme, yaitu: (1) Paradigma konstruktivisme memuat fakta, fakta yang dikumpulkan harus bebas dari proposisi (hipotesis dan pertanyaan); (2) dibawah ketentuan teori, tidak ada teori yang bisa sepenuhnya menguji oleh karena masalah induksi, realita disini hanya dapat dilihat melalui jendela teori baik secara implisit ataupun eksplisit; (3) nilai yang bersumber dari fakta. Konstruktivis setuju dengan argumen yang ideologis bahwa penyelidikan tidak bisa bebas nilai. If ‘‘reality’’ can be seen only through a theory

window, it can equally be seen only through a value window; dan (4) interaksi alamiah pada penyelidikan.

Pendapat lain mengemukakan bahwa secara umum paradigma terbagi ke dalam tiga hal, yaitu: *Pertama*, paradigma klasik yang menempatkan ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam fisika. Menempatkan ilmu sosial sebagai metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan *deductive logic* dengan pengamatan empiris. Bertujuan menemukan hubungan sebab akibat yang dapat digunakan memprediksi pola-pola umum dari gejala sosial tertentu. *Kedua*, paradigma konstruktivisme, memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action*. Ilmu diperoleh melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap perilaku sosial dalam suasana keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan atau mengelola dunia sosial mereka. *Ketiga*, paradigma kritismendefinisikan ilmu sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap “the real structures” dibalik ilusi atau kesadaran palsu yang ditampakkan dipermukaan. Bertujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar seseorang atau masyarakat dapat memperbaiki dan merubah kondisi kehidupannya.

Paradigma *constructivism* merupakan manifestasi dari *research about people*. Paradigma ini berasumsi bahwa setiap manusia memiliki *construct* (bangunan “kebenaran”) dan *construe* (cara memahami “kebenaran”) yang berbeda-beda. Dengan demikian akan menjadi daya tarik yang besar bagi suatu peneliti, apabila dapat mengenali *construct* dan *construe*. Secara radikal, konstruktivisme menolak objektivitas, yang ada dalam pandangan konstruktivis adalah pemaknaan kita tentang

yang nyata (empirik) di luar yang kita konstruksikan, *empirical-constructed fact* (Muhadjir, 2000:189).

Penelitian ini berusaha untuk mengkonstruksi ideologi politik umat Islam pada ruang dan mekanisme demokrasi yang selalu dinamis. Esensinya, masyarakat tidak bisa melepaskan dirinya dari fakta-fakta disekelilingnya pada saat mereka menentukan pilihan-pilihan politiknya. Pikiran-pikiran masyarakat tidaklah murni, tetapi terbentuk secara dialektikal yang melibatkan banyak faktor yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga menjadi perilaku politik. Pada konteks itu, umat Islam memiliki pilihan politik yang berbasis ideologi (agama) masing-masing, pun dalam memaknai demokrasi yang tumbuh dan berkembang dalam ruang sosial.

3.2 Jenis Penelitian

Sebagaimana tujuannya, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh deskripsi komprehensif mengenai ideologi politik umat Islam dalam ruang demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Sugiyono (2016:10), memaparkan beberapa aksioma tentang penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Sifat realitas: ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman
- b. Hubungan peneliti dengan yang diteliti: interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna
- c. Kemungkinan generalisasi: *transferability* (hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu)
- d. Peranan nilai: terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data.

Penelitian kualitatif pun ditandai oleh beberapa hal, demikian:

- a. Riset yang bersifat deskriptif.
- b. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
- c. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
- d. Penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.
- e. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti.

Penelitian kualitatif menggunakan nalar induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang tunggal untuk kemudian ditarik menjadi pemahaman universal. Dalam pandangan kualitatif, fakta-fakta tidaklah berdiri sendiri, melainkan satu sama lain saling terangkai untuk membentuk pemahaman umum.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena atau melukiskan fakta atau karakteristik informan secara sistematis, faktual dan cermat mengenai ideologi politik umat Islam dalam lingkup demokrasi. Penelitian kualitatif ditandai oleh beberapa hal: (1) Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan. (2) Manusia sebagai instrumen penelitian, dengan tidak ada jarak antara

peneliti dan yang diteliti akan diperoleh pemahaman dan penghayatan obyek yang diteliti. (3) Penggunaan teori digunakan untuk membantu memahami gejala, setelah selesai meneliti teori tersebut dapat diterima atau ditolak sama sekali, bahkan menemukan teori baru.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren dan santri. Kedua subjek penelitian ini dipandang representatif dalam menggambarkan ideologi politik umat Islam di Indonesia dalam bingkai demokrasi yang terus bergerak. Subjek penelitian (informan) akan dipilih dari beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa melalui teknik *purposive sampling*. Kriteria informan adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang ontologi penelitian sehingga akan diperoleh data yang memiliki kualitas tinggi. Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih bukan dari aspek kuantitasnya melainkan dari aspek kualitasnya, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang mendalam tentang fokus penelitian. Oleh karena itu, lokus tidak dipemasalahkan. Sepanjang para informan dianggap memiliki pengetahuan tentang fokus penelitian, maka merekalah yang menjadi informannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Peneliti akan menyusun sejumlah pertanyaan terbuka yang akan diajukan kepada subjek Penelitian. Guna memperdalam data yang dikumpulkan, maka wawancara yang dilakukan akan menyusur kepada pertanyaan-pertanyaan inti yang terkait dengan ideologi politik umat Islam dalam dalam setiap perhelatan demokrasi.

Untuk melengkapi data sekunder (data tambahan), peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Data mengenai latar pesantren, situasi, kondisi serta identitas pesantren akan dikumpulkan melalui pengamatan (ditcatat dan direkam) untuk kemudian dirangkai menjadi data yang mendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan bagian penting dalam rangkaian penelitian, yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Suprayogo dan Tobroni, 2001:191).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dimulai sejak perumusan masalah hingga penulisan hasil penelitian. Menurut Mulyana (2001:148), dalam perspektif subjektif (kualitatif) analisis data dilakukan secara induktif; berkesinambungan sejak awal hingga akhir; mencari model, pola atau tema.

Proses analisis data harus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, data tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah (Moleong, 2006:247). Untuk kepentingan penelitian ini, analisis data yang digunakan mengacu kepada teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik ini disebut *interactive modle* yang pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Secara lebih utuh tahap-tahap dalam analisis data ini sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Reduksi data (*data reduction*) bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukann oleh peneliti selama analuisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. Dalam reduksi data ini ditempuh dua hal, yaitu: *Pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. *Kedua*, peneliti menyusun kode-kode catatan-catatan (memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data.
- b. Penyajian data. Penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan.
- c. Penarikan dan pengujian kesimpulan. Penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*), yaitu pengimplementasian prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Pesantren

Sejak ratusan tahun yang lalu, pesantren menjadi basis pendidikan yang memberikan kontribusi besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan pesantren, kiyai dan santri menjadi barisan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam catatan sejarah yang disunting oleh Martin van Bruinessen⁴, pesantren telah muncul sejak abad ke 18, yaitu Pesantren Tegalsari di Ponorogo, Jawa Timur, tepatnya pada tahun 1742.

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pendidikan modern. Di antara karakteristik pesantren yang penting adalah adanya pondok atau asrama tempat tinggal para santri, masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan dan pendidikan, pengajaran kitab-kitab klasik, para santri, dan kiyai. Dua diantara lima karakteristik dari pesantren merupakan yang paling penting, karena hidup dan kehidupan pesantren berfokus pada santri dan kiyai. Bahkan pada tataran yang lebih jauh, kiyai adalah sentral yang memberi “ruh” bagi kehidupan pesantren. Secara sosiologis, banyak muncul ke permukaan kiyai-kiyai “*khos*” (khusus), atau kiyai yang memiliki tingkat keberagamaan makrifat.

Pada pesantren, kiyai merupakan sosok teladan yang menjadi panutan para santri. Kewibawaan kiyai didukung oleh perilaku yang saleh, pengetahuan agama yang dalam, mampu memberikan solusi bagi problematika masyarakat serta mampu menjadi pendidik bagi santri dan masyarakat sekitar. Bila terjadi hal-hal yang diluar kemampuan nalar masyarakat, maka pesantren dan kiyai kerap kali dijadikan sebagai rujukan.

⁴Lihat <https://khazanah.republika.co.id>

Pada penelitian ini menyasar sejumlah pesantren yang ada di Pulau Jawa, di mulai dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Dari tiap-tiap provinsi diambil beberapa pesantren secara *purposive-snowball sampling* sebagai representasi guna menghadirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan (observasi), dan analisa dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian, profil pesantren yang menjadi basis penelitian dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, pesantren tradisional, yaitu pesantren “salaf” yang corak pendidikannya didasarkan kepada kajian kitab-kitab klasik dengan metode pengajaran “sorogan”. Salah seorang informan di Banten mengemukakan, demikian:

Pesantren tradisional (*salafiyah*) mengacu pada pola pembelajaran yang mengedepankan kitab kuning tanpa terlalu menekankan adanya lembaga pendidikan formal semacam madrasah atau sekolah. Media pembelajaran dapat menggunakan masjid atau tempat seperti aula. Para santri akan menyatu dalam pembelajaran sehingga tercipta suasana kekeluargaan (Hasil wawancara).

Senada dengan itu, informan lain dari pesantren di Jakarta mengatakan titik tekan pesantren yang berbasis keilmuan tradisional, demikian:

Pesantren tradisional (*salafiyah*) adalah pesantren yang berbasis kitab kuning dengan metode pembelajaran khas tradisional (sorogan) yang menempatkan kiyai sebagai sumber utama. Di sini, kiyai memegang peranan sentral yang mengendalikan seluruh kegiatan pesantren dan dibantu oleh santri-santri lain yang lebih senior. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, maka peraturan-peraturan yang diterapkan berbeda dengan di lembaga pendidikan formal. Misalnya ruangan

belajar, seragam, ketersediaan makanan, bahkan biaya Pendidikan (Hasil wawancara).

Lebih lanjut, informan lain dari pesantren di Tasikmalaya mengemukakan, demikian:

Pada pesantren tradisional, ilmu-ilmu keagamaan (Islam) diperoleh melalui kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang menggunakan “arab gundul”. Oleh karena itu, para santri dituntut untuk menguasai “ilmu alat” sebagai cara untuk memahami kitab kuning. Para santri juga hidup sederhana dan bersahaja. Semua dilakukan dengan gotong royong dan penuh kekeluargaan. Cara ini ditempuh guna menempa fisik dan mental para santri ketika terjun ke masyarakat kelak (Hasil wawancara).

Pada pesantren jenis ini, kiyai memegang peran sentral dalam mengendalikan seluruh kegiatan pesantren. Santri dan seluruh elemen yang ada di pesantren “tunduk” kepada “fatwa” kiyai. Dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa kiyai memiliki hegemoni tunggal. Dari hasil pengamatan, pesantren dalam kategori pertama ini (tradisional), di dominasi oleh para santri dari berbagai daerah yang sengaja ingin memperdalam ajaran Islam. Mereka umumnya menggunakan busana khas pesantren tradisional seperti baju koko dan sarung. Mereka pun umumnya sangat hormat pada pimpinan pesantren terlebih-lebih pada kiyainya.

Hidup sederhana dan bersahaja menjadi profil penting pesantren tradisional. Di salah satu pesantren di Majalengka misalnya, masih ditemukan para santri mandi di kolam besar secara bersama-sama. Memasak nasi secara bersama-sama yang dikenal dengan istilah “*ngaliwet*”, disajikan pada nampan besar serta dimakan secara bersama-sama. Kata kiyai pada pesantren tersebut: “inilah potret kesederhanaan pesantren yang saat ini telah menjadi “barang” langka” (Hasil wawancara).

Seorang informan di sebuah pesantren di Ponorogo Jawa Timur mengemukakan, demikian:

Di pesantren seperti kami, kiyai menjadi pemimpin utama yang sangat dihormati oleh para santri. Rasa ta'dzim kepada kiyai merupakan cara “ngala berkah”, sehingga ilmu-ilmu yang diperoleh menjadi bermanfaat dan berkah. Santri diharapkan mampu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di pesantren untuk diterapkan di masyarakat kelak. Seorang kiyai akan haru dan bangga ketika para santrinya mampu mendirikan pesantren di daerahnya (Hasil wawancara).

Informan dari pesantren yang ada di Garut Jawa Barat menekankan kiprah alumninya kelak, demikian:

Kebanggaan seorang kiyai terletak pada kiprah anak asuhnya apabila mampu mendirikan pesantren di daerahnya. Ini pertanda bahwa ilmunya berkah, mampu memberikan Pendidikan kepada masyarakat luas. Memang dalam faktanya tidak semua lulusan pesantren dapat mendirikan pesantren. Saya pikir ada berbagai faktor juga yang memengaruhinya (Hasil wawancara).

Peneliti datang ke beberapa pesantren tradisional di beberapa daerah di Pulau Jawa. Di daerah Banten misalnya, pesantrennya berada di tengah-tengah kepadatan rumah penduduk, atau dapat dikatakan pesantren ini menyatu dengan pemukiman penduduk. Dilihat dari bangunannya cukup sederhana. Meskipun sudah dibangun dua lantai, tetapi kesan sederhana tidak dapat disembunyikan. Di depan kamar-kamar satri masih berjejer cucian baju, sarung dan lain-lain. Cat temboknya sudah mulai kusam dengan keramik yang tidak lagi kelihatan cerah. Para santri dan santriyah mengenakan baju sederhana tanpa manik-manik atau hiasan jenis lain. Ketika disapa umumnya malu-malu sebagai ekspresi sosiologis orang

daerah. Namun demikian, dari tatap dan raut wajahnya mereka menyiratkan ketulusan dan penerimaan tanpa pamrih (Hasil observasi).

Kedua, modern, yaitu pesantren yang telah mengadopsi sistem pendidikan modern yang bersumber dari kurikulum Kementerian Pendidikan. Sistem pembelajarannya telah menggunakan sarana modern seperti kelas, teknologi pendidikan modern, guru-guru yang profesional berbasis Sarjana Pendidikan, dan para santri menggunakan pakaian sebagaimana yang digunakan oleh sekolah-sekolah modern.

Salah seorang informan dari salah satu pesantren cabang Gontor mengemukakan, demikian:

Pesantren kami dapat dikatakan pesantren modern. Cirinya, selain para santri mondok mereka juga belajar seperti pada sekolah-sekolah modern. Sarana pendidikan bersifat klasikal, penggunaan kurikulum pemerintah, seragam sekolah, upacara bendera, guru-guru berbasis keluaran perguruan tinggi, dan sebagainya. Namun demikian, peran kiyai masih cukup dominan mewarnai kehidupan pesantren (Hasil wawancara).

Informan lain mengungkapkan dalam arti perbedaan modern dan tradisional, demikian:

Namanya juga pesantren modern (sambil tertawa kecil), tentu saja cara pembelajarannya menggunakan metode-metode modern, guru-gurunya bergelar sarjana dan yang dipelajarinya sama dengan di sekolah-sekolah modern lain. Artinya ilmu-ilmu yang diajarkan mengikuti kurikulum nasional. Tetapi para murid juga mendapat tambahan materi pembelajaran yaitu ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Perpaduan ini diharapkan akan membekali santri (siswa) tidak saja oleh ilmu-ilmu umum, tetapi juga dibekali oleh ilmu-ilmu agama (Hasil Wawancara).

Senada dengan informan di muka, informan lain dari pesantren di daerah Jawa Tengah mengemukakan tentang substansi pesantren modern, demikian:

Sebaiknya tidak harus terjadi perdebatan tentang pesantren tradisional dan modern, sebab yang lebih penting adalah misinya dalam mencerdaskan anak bangsa, para santri. Tujuan tidak boleh dikalahkan oleh istilah modern dan tradisional. Keduanya berjuang dalam rangka mendidik dan mencerdaskan anak bangsa untuk membawa negara kearah yang lebih baik. Bagi saya, modern atau tradisional tidak harus dipertentangkan, toh keduanya memiliki kelebihan (Hasil wawancara).

Beberapa pendapat di muka memberikan tekanan bahwa tipologi pesantren modern berbasis kurikulum modern yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan modern yang berbasis kurikulum nasional serta penggunaan sarana-sarana modern.

Berdasarkan hasil observasi, suasana pada pesantren modern dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pesantren modern menggunakan bangunan atau gedung-gedung bertingkat dengan beton yang kokoh. Ruangan dibagi menjadi kelas-kelas dengan menggunakan kursi dan meja sebagaimana layaknya pada sekolah-sekolah modern. Guru-guru menggunakan kemeja dan berdas, bahkan di beberapa pesantren guru menggunakan jas lengkap dengan dasinya. Tidak ada kesan tradisional yang menggunakan sarung dan baju koko. Halaman sekolah didesain luas untuk kegiatan upacara bendera dan kegiatan olah raga. Tiang bendera terpancang seolah menembus langit. Ketika saya memasuki salah satu pesantren cabang Gontor, saya harus lapor dulu dan ditanyakan

tujuannya apa. Setelah memarkirkan mobil lalu diantar oleh santri yang ditugaskan untuk berjaga untuk bertemu dengan salah satu kiyanya (Hasil observasi).

Pengalaman yang menarik juga saya temukan di salah satu pesantren di Magetan Jawa Timur. Di pesantren yang santrinya puluhan ribu dan seluruh satriyahnya bercadar, saya diam sejenak dan mematung. Masjidnya dapat menampung ribuan jamaah, katanya seluas lapangan sepak bola. Aulanya dapat menampung sekitar puluhan ribu juga lengkap dengan pengeras suara yang “menggelegar”. Ketika saya datang ke pesantren tersebut malam hari tengah ada pertemuan dengan beberapa pimpinan pesantren dari India, Bangladesh dan beberapa negara lainnya. Suasananya begitu riuh. Para santri puluhan ribu mengikuti pengajian dari beberapa kiyai. Yang lebih mengagumkan bagi saya, seluruh santri perempuan bercadar. Saya menyaksikan seperti lautan cadar tanpa tepi (Disarikan dari hasil observasi).

Salah seorang informan dari pesantren modern mengungkapkan tentang profil anak didik yang diharapkan, demikian:

Pesantren modern itu sama dengan sekolah modern lainnya, hanya di sini siswa atau santri mondok. Jadi mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu agama. Saya rasa cara ini cukup ideal sebagai solusi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan keilmuan umum dan keilmuan pesantren. Sehingga diharapkan mereka dapat berkiprah di masyarakat dengan bekal yang lengkap. Mereka juga diharapkan menjadi bagian solusi atas problematika umat yang saat ini semakin rumit (Hasil wawancara).

Salah seorang kiyai dari pondok pesantren modern memberikan pendapatnya, demikian:

Sejauh ini kerap kali ada pandangan dikotomis yang membelah sistem pendidikan pada kutub modern dan tradisional untuk pesantren. Ini seharusnya tidak boleh terjadi, sebab misi dan visi pendidikan termasuk di pesantren pada dasarnya sama. Pesantren ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Ilmu-ilmu agama yang dikaji di pesantren diharapkan akan menjadi pelengkap bagi para lulusan pesantren. Di pesantren ilmu dan agama diselaraskan sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang tidak saja cerdas secara keilmuan umum, tetapi memiliki kepribadian yang kuat, kokoh dan religius. Saya merasa saat ini yang menjadi masalah adalah hilangnya panutan di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap dengan kehadiran alumni pesantren yang akhlakul karimah dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya (Hasil wawancara).

Secara historis, kelahiran pesantren modern di Indonesia dipelopori oleh Pondok Modern Gontor. Sejatinya, istilah “modern” dalam terminologi Gontor mengacu kepada nilai-nilai komodernan yang positif seperti disiplin, rapi, tepat waktu, kerja keras. Di dalamnya termasuk nilai modern yang bersifat fisik yang tercermin dalam cara berpakaian santri Gontor dengan simbol dasi, jas, dan rambut pendek ala militer. Pada dasarnya, tidak ada karakteristik yang *establish* (kokoh) untuk menunjuk pondok pesantren modern. Namun beberapa karakteristik modern disematkan kepada hal-hal berikut:

1. Penekanan pada bahasa Arab percakapan.
2. Memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer (bukan klasik/kitab kuning).
3. Memiliki sekolah formal dibawah kurikulum Diknas dan/atau Kemenag dari SD/MI, MTS/SMP, MA/SMA, maupun sekolah tinggi.
4. Tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional seperti sorogan, wetonan, dan bandongan.

Ketiga, pesantren semi modern. Istilah ini peneliti kemukakan untuk memberikan perbedaan dengan dua karakteristik pesantren sebelumnya. Dikatakan semi modern didasarkan atas tipologi pesantren yang masih menggunakan sistem tradisional tetapi di sisi lain telah menggunakan sistem pendidikan modern. Dalam ungkapan lain setengah tradisional dan setengah modern. Santri atau siswa mendapatkan dua sistem pengajaran, yaitu belajar seperti disekolah dan belajar seperti di pesantren tradisional.

Seorang informan di salah satu pesantren di Bandung Jawa Barat mengungkapkan, demikian:

Pesantren ini menggunakan dua model pembelajaran, yaitu jika siang mereka (siswa/ santri) sekolah formal dan malam harinya mengkaji kitab-kitab kuning khas pesantren. Mereka juga mondok sebagaimana di pesantren tradisional lainnya. Jadi bedanya, karena mereka juga sekolah formal maka akan mendapat ijazah formal yang diakui oleh negara. Paduan cara belajar ini memungkinkan siswa memiliki cara pandang yang lebih lengkap sebagai bekal kelak di masyarakat (Hasil wawancara).

Informan lainnya di pesantren wilayah Semarang mengungkapkan pendapatnya, demikian:

Di zaman sekarang, tipe pesantren semi modern mungkin masih pandang cocok, karena memadukan pendidikan modern dan tradisional. Anak didik juga disamping mendapatkan ijazah formal juga memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu-ilmu keagamaan berbasis kitab kuning. Siswa juga diharapkan mampu mengkombinasikan kedua keilmuan itu sebagai bekal di masyarakat (Hasil wawancara).

Seorang informan dari salah satu pondok pesantren semi modern mengungkapkan, demikian:

Kehadiran dan eksistensi pesantren telah memberikan kontribusi besar bagi tumbuh kembangnya pendidikan di Indonesia. Dunia pesantren membekali para santri dengan wawasan keagamaan yang relatif luas yang diharapkan akan membawa perubahan pada masyarakat. Masyarakat tidak cukup memiliki kapasitas ilmu-ilmu umum, tetapi membutuhkan ilmu-ilmu agama yang dibawa oleh para lulusan pesantren. Ini akan menjadi perpaduan yang lengkap (Hasil wawancara).

Dilihat dari hasil wawancara di muka, bahwa pesantren semi modern menggunakan dua sistem pembelajaran secara seimbang. Santri atau siswa dituntut untuk memahami ilmu-ilmu non agama (umum) sebagaimana yang diajarkan dalam sekolah umum, di sisi lain santri atau siswa dituntut memahami ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Profil Informan

Informan menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, untuk memperoleh informan yang kredibel dilakukan dua pendekatan yang disebut dengan otentisitas dan reflektivitas. Otentisitas mengacu kepada karakteristik informan sebagai pelaku (otentik). Jadi, informan ini adalah pimpinan (kiyai), pengurus pesantren serta santri. Hal ini perlu dilakukan secara tepat agar data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan reflektivitas mengacu kepada informan yang dapat mengungkapkan seluruh pengalaman dan pengetahuannya tentang dunia pesantren serta mampu menjawab beragam pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui wawancara.

Informan pertama diambil dari kalangan kiyai dari beberapa pesantren yang menjadi lokus penelitian. Pemilihan kiyai sebagai informan didasarkan kepada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) pemilik pesantren, (2) secara keilmuan tidak diragukan, (3) panutan para santri, (4) berpengaruh dikalangan masyarakat, dan (5) mampu sebagai solutor terhadap beragam problematika masyarakat.

Para kiyai dalam kesehariannya kerap kali dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang nyata di masyarakat, bisa persoalan ibadah, sosial, ekonomi hingga persoalan politik. Realitas demikian menuntut seorang kiyai memiliki pengetahuan yang luas yang berfungsi sebagai tempat bertanya. Bahkan tidak jarang apa yang dipertanyakan oleh masyarakat itu adalah hal-hal yang menjadi polemik dan menyedot perhatian masyarakat luas.

Seorang informan dari pesantren di Jakarta mengemukakan pendapatnya, demikian:

Masyarakat menganggap kiyai itu adalah orang super yang harus mengetahui dan memahami beragam persoalan masyarakat. Itu nyata

di masyarakat. Oleh karena itu kiyai dituntut untuk memahami beragam keilmuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan politik. Ini sudah menjadi konsekuensi. Oleh karena itu, kiyai pun harus senantiasa meningkatkan keilmuannya. Bila kiyai hanya berlandaskan kepada rujukan kitab-kitab klasik saja maka akan menemui hal-hal yang mungkin rumit untuk dijeladaskan (Hasil wawancara).

Menurut pemaparan salah seorang informan dari kalangan kiyai ini, ada banyak masyarakat yang meminta semacam fatwa kepada pimpinan (kiyai) pondok pesantren. Ia mengungkapkan demikian:

Ada kalanya masyarakat dihadapkan kepada beberapa masalah yang memerlukan pandangan ulama (kiyai). Mereka umumnya datang kepada kami untuk meminta penjelasan dari segi syariah. Misalnya, dalam pilpres 2019 tentang keutamaan memilih pemimpin. Maka ulama harus menjelaskan dari sudut pandang syariah, namun demikian kami tidak memaksa untuk memilih salah satu, kewajiban kami memberikan pandangan berdasarkan syariah, masalah pilihan sangat tergantung masing-masing (Hasil wawancara).

Informan lain dari pesantren di Banten mengemukakan pandangannya, demikian:

Kiyai atau ulama itu gelar yang diberikan masyarakat bukan kita yang meminta. Masyarakat sudah sangat cerdas untuk urusan itu. Oleh karena itu, kiyai memiliki tanggung jawab yang besar sebagai panutan masyarakat, tempat mereka mengadukan berbagai masalah keumatan. Mereka datang dengan masalah-masalah agama, sosial, politik dan lain-lain. Ujian untuk kiyai itu sangat berat, karena menjadi contoh bagi masyarakat (Hasil wawancara).

Dua pendapat di muka memberikan data bahwa pimpinan pesantren begitu sentral di tengah-tengah masyarakat sebagai solutor, pemberi gagasan, memberikan penjelasan dan penerangan kepada masyarakat tentang beragam problematika masyarakat. Tentu saja, pandangan yang diberikan oleh para kiyai berasal dari ajaran-ajaran Islam dan bersumber dari Al-Qur'an serta Hadits.

Informan kedua berasal dari pengurus pesantren. Informan ini diambil dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas baik secara keilmuan maupun secara manajerial. Umumnya, pimpinan pesantren yang sehari-harinya mengurus pesantren adalah mereka yang tidak saja memiliki keilmuan keagamaan yang mumpuni, tetapi juga mereka yang memiliki kemampuan mengurus pesantren secara baik. Tidak sedikit pula pengurus pesantren diambil dari kalangan santri senior yang dinilai oleh kiyai sudah cukup memadai. Di sisi lain, ada juga pengurus pesantren yang diambil dari keluarga kiyai dengan syarat keilmuannya dapat dipertanggungjawabkan.

Salah seorang informan mengemukakan tentang kriteria pimpinan pesantren, demikian:

Orang yang mengurus pesantren itu memiliki amanah yang berat, karena bertanggung jawab kepada kiyai, masyarakat dan tentu saja Allah SWT., jadi tidak main-main. Kita harus mampu memberikan contoh yang baik, taat aturan dan menjadi panutan bagi para santri, Di sisi lain kita juga harus bersikap objektif, artinya menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Sebagai pimpinan pesantren kita juga harus mampu menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar, sehingga keberadaan pesantren bermanfaat bagi lingkungan (Hasil wawancara).

Informan lain dengan penuh kehati-hatian dalam mengungkapkan pandangannya mengemukakan, demikian:

Seorang pengurus pesantren bukan saja pandai dalam bidang ilmu agama, tetapi juga harus memiliki kepemimpinan. Sebab pesantren itu terdiri dari ribuan orang, terutama para santri. Jadi bila tidak memiliki kemampuan memimpin agak repot. Belum lagi pesantren itu bersentuhan dengan masyarakat sekitar, artinya pihak pesantren harus sanggup memberikan kontribusi bagi lingkungan, dan itu memerlukan kemampuan kepemimpinan (Hasil wawancara).

Senada dengan itu, salah seorang informan dari Pondoik Pesantren di Temboro mengemukakan, demikian:

Kita itu memiliki kurang lebih lima puluh ribu santri, laki-laki dan perempuan. Itu artinya tidak gampang dalam mengelolanya. Oleh sebab itu, yang menjadi pimpinan pesantren dengan jumlah santri yang besar harus memiliki kemampuan memimpin. Tidak cukup memiliki kapasitas dalam ilmu-ilmu keagamaan, tetapi harus melengkapi diri dengan ilmu-ilmu kepemimpinan dan manajemen (Hasil wawancara).

Salah seorang kiyai muda dari pondok pesantren modern mengemukakan hal yang sama, demikian:

(sambil menyandarkan tubuhnya)... adalah pandangan yang keliru jika memandang kiyai saat ini hanya memiliki pengetahuan keagamaan saja. Mungkin kiyai tidak bisa bicara banyak tentang teknologi, tetapi para kiyai memiliki pengetahuan yang luas pada ilmu-ilmu sosial. Jangan lupa bahwa kitab-kitab klasik juga berbicara tentang ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya (Hasil wawancara).

Dari kutipan wawancara di muka, dapat disimpulkan bahwa pimpinan atau pengurus pesantren adalah mereka yang memiliki keilmuan keagamaan dan kemampuan untuk memimpin (*leadership*). Berdasarkan bidang garapan serta beratnya tanggung jawab, maka pimpinan atau pengurus pesantren layak dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

Informan ketiga diambil dari kalangan santri. Santeri adalah orang-orang yang tinggal di pesantren dengan tujuan mendalami ilmu-ilmu agama. Tidak dapat dikesampingkan bahwa santri bagian dari pesantren, bahkan eksistensi pesantren kerap kali dikaitkan dengan jumlah santri yang mukim di pesantren tersebut. Dalam konteks pesantren modern maupun tradisional, santri tidak seharusnya menjadi objek pesantren tetapi harus didudukkan sebagai subjek. Artinya, santeri juga memiliki peran penting dalam menghidupkan pesantren hingga menyebarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat luas.

Ketika disodorkan pertanyaan tentang peranan santri di pesantren, salah seorang informan dari kalangan mengemukakan, demikian:

Kiyai jelas sangat berperan dalam pesantren, tetapi jangan lupa bahwa santri pun memiliki peranan penting dalam pesantren. Pesantren suka dikaitkan dengan jumlah santrinya. Apabila suatu pesantren memiliki banyak santri, maka pesantren itu berarti bagus. Santri juga dalam pandangan masyarakat adalah anak-anak yang memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi. Jadi santri itu sangat berperan (Hasil wawancara).

Informan lain masih dari kalangan santri mengungkapkan pendapatnya, demikian:

Untuk menjadi pengurus pesantren dapat dikatakan tidak sembarangan, selain memiliki keilmuan yang teruji juga harus memiliki kemampuan memimpin. Tidak semua santri memiliki keduanya. Bisa juga mereka yang dipilih menjadi pengurus pesantren dari kerabat kiyai, jadi kiyai sebagai garansinya. Yang terpenting mereka adalah orang-orang yang amanah (Hasil wawancara).

Apalagi jika seorang santri itu tidak hanya belajar ilmu agama dari kitab-kitab klasik, tetapi ia juga belajar dari buku-buku modern yang bersumber dari ilmu-ilmu umum. Perpaduan dua keilmuan itu akan menempatkan posisi santri menjadi lebih tinggi. Ia tidak saja mampu memberikan analisa terhadap problematika kehidupan masyarakat dari perspektif ilmu-ilmu keagamaan (*syariah*), tetapi juga mampu memberikan pandangan berdasarkan ilmu-ilmu umum.

Pada kenyataannya, tidak semua santri dapat menjadi pengurus (pimpinan pesantren), tetapi hanya santri yang dimata kiyai sudah cukup keilmuannya. Di samping itu santri yang diangkat menjadi pengurus pesantren adalah mereka yang memiliki keilmuan memadai sehingga memiliki wibawa bagi santri-santeri lainnya. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang didalamnya melibatkan ribuan bahkan puluhan ribu manusia yang sudah barang tentu memerlukan kecakapan tersendiri dalam mengurusnya. Kemampuan *leadership* menjadi salah satu persyaratan yang tidak bisa diabaikan.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dalam garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu fokus yang berkaitan dengan pilihan politik (posisi) umat Islam yang dalam konteks penelitian ini diwakili kalangan pesantren dalam pilpres 2019 serta pemahaman demokrasi kalangan pesantren di Indonesia.

4.3 Posisi Politik Umat Islam Pada Pilpres 2019

Secara faktual, pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang baru lalu sarat dengan politik aliran, di mana politik aliran dalam definisi sempit yaitu gerakan politik dengan mengusung aliran tertentu, misalnya berdasarkan agama tertentu, atau ideologi tertentu. Dalam politik aliran, maka “sentimen” menjadi penting guna menyatukan visi dan misi untuk mencapai tujuan tertentu. Massa dalam politik aliran kerap kali tidak lagi kritis (rasional), tetapi lebih emosional dengan dasar solidaritas atau persaudaraan yang dilandaskan kepada agama misalnya.

Istilah politik aliran dipopulerkan oleh Antropolog Amerika Clifford Geertz, yang menyebut istilah politik aliran sebagai cara pandang dunia orang Jawa terhadap kepercayaan agama, etnis dan ideologi politik. Secara sosiologis, manusia dapat disatukan bila memiliki “rasa” bersama seperti pada agama atau ideologi politik. Sebagai kosekuensinya di Indonesia, setiap kali perhelatan pilpres atau pilkada kemudian masyarakat mengelompokkan diri sebagai kelompok *religious* dan nasionalis.

Kelompok religus diusung dengan mengedepankan nilai-nilai berbasis agama dalam memilih pemimpin. Situasi ini akan berkembang membelah umat (masyarakat) kepada dua kutub yang saling berhadapan secara diametral. Misalnya, dalam pilkada Jakarta masyarakat terbelah menjadi kelompok Islam dan non-Islam. Atau dalam pilpres yang baru lalu, salah seorang capres didukung oleh kelompok yang menamakan dirinya 212. Meskipun hal demikian lumrah dalam demokrasi, tetapi di sisi

lain akan menimbulkan gesekan keras yang berakibat konflik vertikal dan horizontal.

Pada penelitian ini, peneliti menyusur sejumlah pesantren yang ada di Pulau Jawa untuk mengumpulkan data yang terkait dengan fokus penelitian posisi umat Islam dalam pilpres 2019. Fokus penelitian ini menjadi penting guna memotret pergerakan politik umat Islam sekaligus memetakan pilihan politik umat Islam dalam menentukan pemimpinnya. Secara politik, perhelatan pilkada terlebih pilpres menjadi barometer tentang posisi umat Islam. Meskipun sejauh ini tidak ada posisi yang absolut bahwa umat Islam memilih pemimpin umat Islam (seiman), tetapi politik aliran ini “ampuh” digunakan untuk memengaruhi para pemilih dalam kategori emosional-tradisional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi ideologi umat Islam dalam pilpres 2019 terbelah menjadi tiga bagian, yaitu: (1) memilih berdasarkan prinsip agama, (2) memilih berdasarkan kompetensi, dan (3) apatis dengan kepentingan pragmatis. Tentu saja, ketiga kelompok tersebut memiliki basis argumentasi yang kuat sebagai cara untuk membangun kebersamaan.

Pada kelompok pertama, memilih berdasarkan prinsip agama. Agama dijadikan sebagai pondasi dalam perilaku sosial dan politik, karena memilih pemimpin berdimensi dunia dan akhirat. Artinya, pemimpin harus dari kalangan seiman sehingga tidak bertentangan dengan syariah. Ayat Al-Qur'an yang melarang umat Islam memilih yang non-muslim menjadi basis teologis yang kuat sehingga mengikat semua muslim untuk menentukan pemimpin seiman (QS. Al-Maidah:50).

Salah seorang informan mengungkapkan tentang pentingnya pemimpin muslim, demikian:

Agama itu harus menjadi dasar dalam memilih pemimpin, karena pemimpin akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang tentu saja akan mengikat masyarakatnya. Namun bukan halnya itu, memilih pemimpin dari kalangan muslim adalah perintah Allah, perintah agama yang harus atau wajib dilaksanakan. Jadi, memilih pemimpin itu berdimensi dunia dan akhirat (Hasil wawancara).

Informan lain dari pesantren di daerah Jawa Timur mengemukakan pendapatnya, demikian:

Salah satu kekurangan umat Islam saat ini dalam menentukan pemimpin. Kita harus kembali ke ajaran Islam, yaitu memilih pemimpin dari kalangan muslim. Meskipun memang tidak ada jaminan bahwa pemimpin dari kalangan muslim berpihak kepada kepentingan umat Islam. Sekarang banyak pemimpin dari kalangan muslim termasuk presiden, tetapi tetap kurang memiliki keberpihakan kepada umat Islam. Mereka baru sebatas muslim, tetapi masih jauh dari harapan umat Islam (Hasil wawancara).

Salah seorang informan di Pekalongan yang mengelola pesantren mahasiswa berpendapat, demikian:

Umat Islam saat ini sudah gandrung untuk memilih pemimpin dari tokoh Islam yang memiliki kepedulian kepada umat Islam. Namun sejauh ini masih jauh dari harapan. Ini memang menyangkut kualitas dan integritas pemimpin dari kalangan muslim saat ini. Kita menyaksikan saat ini mayoritas kepala daerah bahkan presiden sekalipun dari kalangan muslim. Tetapi keberadaan mereka belum memberikan kontribusi besar untuk umat Islam (Hasil wawancara).

Agama dijadikan alat legitimasi guna memengaruhi umat Islam untuk memilih pemimpin yang seiman. Mereka beranggapan tidak mempolitisasi agama, karena agama sebagai pedoman hidup, maka apa yang dikatakan

agama harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam memilih pemimpin. Mereka juga berkeyakinan bahwa Islam hadir bukan sekedar seperangkat ritus melainkan sebagai pedoman yang menyeluruh termasuk dalam memilih pemimpin. Bahkan wajib hukumnya untuk memilih pemimpin seagama (seiman) meskipun bukan di negara yang berdasarkan agama.

Seorang informan dari pesantren salafiyah di Majalengka mengemukakan pendapatnya secara lugas, demikian:

Islam itu agama yang lengkap, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai persoalan ekonomi, kehidupan sosial hingga masalah-masalah politik, termasuk dalam menentukan pemimpin. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin umat Islam harus berjuang sekuat tenaga untuk memilih pemimpin yang seiman. Umat Islam perlu disadarkan bahwa memilih pemimpin adalah persoalan syariah yang akan menentukan jati diri umat Islam itu sendiri (Hasil wawancara).

Salah seorang informan dari pondok pesantren di Jawa Timur mengemukakan pendapatnya, demikian:

Umat Islam harus menentukan atau memilih pemimpinnya sendiri berdasarkan tuntunan al-Qur'an, artinya orang Islam. Di sini (Indonesia) mayoritas umat Islam, jadi usahakan pimpinan kita adalah orang Islam dan yang memiliki keberpihakan kepada umat Islam. Karena banyak pemimpin dari umat Islam tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap umat Islam itu sendiri. Sudah waktunya orang Islam yang memiliki kepedulian terhadap umat Islam memimpin (Hasil wawancara).

Pendapat senada diungkapkan oleh salah seorang informan yang mewanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya. Ia berpendapat, demikian:

Umat Islam itu banyak, mayoritas, tetapi belum mampu memilih pemimpin yang benar-benar berpihak bagi nasib umat Islam. Ini masalah besar bagi umat Islam sendiri. Kadang-kadang umat Islam takut atau ditakut-takuti oleh pihak lain, bila memilih pemimpin dari kalangan Islam yang “militan” akan mengacaukan Indonesia. Itu pandangan yang keliru (Hasil wawancara).

Mencermati beberapa kutipan di muka, kalangan pesantren tradisional (salafiyah) memosisikan “dirinya” dalam peta politik pilpres sebagai kelompok yang menginginkan pemimpinnya berasal dari seorang muslim yang taat serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap umat Islam. Mereka seakan “rindu” untuk memiliki pemimpin yang religius serta berkhidmat bagi umat Islam itu sendiri. Bukan sekedar Islam, tetapi muslim yang taat dan memiliki keinginan untuk memajukan umat Islam.

Pernyataan para informan di muka juga sekan ingin menegaskan bahwa pemimpin yang diharapkan bukan sekedar “berlabel” muslim, tetapi yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada umat Islam. Apabila didalami, saat ini banyak pemimpin dari kalangan muslim, tetapi kiprah dan kepemimpinannya masih jauh dari harapan umat Islam. Pemimpin Islam bukan saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi untuk semua warga negara, termasuk non-muslim.

Seorang informan dengan bahasa tubuh yang agak gelisah mengungkapkan pendapatnya, demikian:

Saat ini, nyaris sebagian besar pemimpin di negeri ini adalah muslim, tetapi belum terasa bagi perkembangan umat Islam... (*kitu-kitu keneh*). Saya berharap muncul tokoh yang benar-benar memiliki komitmen terhadap umat Islam. Namun demikian bukan artinya akan

tidak peduli terhadap umat lain. Islam itu *rahmatan lil 'alamin*. Jadi umat lain tidak perlu takut (Hasil wawancara)

Dari hasil penelitian, nyaris seluruh informan dari kalangan pesantren salafiyah-tradisional memiliki pandangan yang serupa. Mereka berpendapat, banyaknya umat Islam saat ini secara kuantitas belum mencerminkan kualitas yang diharapkan. Umat Islam masih belum bersatu, malah kerap kali terpecah hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Hal itu berlaku juga bagi pemimpin-pemimpin partai yang mengusung agama (Islam). Mereka hanya “haus kekuasaan”, dan umat tidak diurus (Disarikan dari hasil wawancara).

Ketika disodorkan kepada beberapa informan tentang kemungkinan pemimpin dari kalangan Islam bersikap intoleran kepada non-muslim, beberapa informan mengemukakan sebagai berikut:

Umat non-muslim jangan takut bila pemimpin Islam yang taat berkuasa, semua akan baik-baik saja dan akan dilindungi sebagaimana Rasulullah di Madinah. Tidak ada ceritanya umat lain diintimidasi bila Islam berkuasa. Justeru yang ada umat Islam teraniaya bila berada di negara yang mayoritas non-muslim, di India misalnya, di Thailand, dan beberapa wilayah lainnya.

Informan lain dari ponpes modern di Jawa Timur mengungkapkan pendapatnya, demikian:

Umat Islam di Indonesia itu memiliki karakteristik berbeda dengan di tempat-tempat lain, lebih menghargai, toleran dan menghormati perbedaan keyakinan. Jadi umat lain tidak perlu takut, sepanjang mereka baik-baik saja maka akan mendapat perlakuan manusiawi dan aman ada di Indonesia. Kami akan melindunginya (Hasil wawancara).

Senada dengan itu, salah seorang kiyai sepuh (informan) mengemukakan pendapatnya, demikian:

Islam itu agama rahmat, bukan hanya untuk umat Islam tetapi untuk seluruh alam. Bila melihat kepada kepemimpinan Rasulullah dan para sahabat, apakah ada kisah dimana umat agama lain dianiaya? Justeru Rasul dan para sahabat menghormati dan menghargai mereka, bahkan mereka dilindungi sepanjang berbuat baik kepada umat Islam. Fakta sejarah itu tidak dapat dibohongi. Islam dan umat Islam adalah pembawa rahmat (Hasil wawancara).

Informan lain yang berasal dari pesantren di Jakarta mengemukakan pendapatnya, demikian:

Baik dilihat dari sejarah, maupun dari fakta-fakta saat ini, umat Islam itu paling toleran. Namun demikian, toleransi yang dimaksud adalah pada tataran sosial kemasyarakatan, bukan persoalan akidah. Untuk akidah kita memiliki batas yang jelas dan tegas. Kita melihat bila umat Islam mayoritas maka umat minoritas aman. Tetapi kadang-kadang bila umat Islam minoritas suka ditindas. Buktinya di Thailand misalnya, dan tempat-tempat lain (Hasil wawancara).

Wawancara dilanjutkan untuk mengungkap tentang faktor-faktor yang membuat umat Islam belum bisa melahirkan pemimpin yang terbaik saat ini di Indonesia. Beberapa informan mengemukakan pendapatnya, demikian:

Kesadaran umat Islam masih rendah tentang pentingnya pemimpin yang seiman dan taat. Mereka masih mengurus perut sehingga memilih bukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan amplop (uang). Umat Islam belum selesai mengenai perut (kesejahteraan), karena cara berpikirnya terbalik yaitu sejahtera dulu baru kemudian memilih pemimpin. Seharusnya dibalik, pilih dulu pemimpin yang

baik maka urusan perut akan diperhatikan. Ini kelemahan cara berpikir yang masih ngurus ekonomi. Meskipun memang harus disadari bahwa saat ini umat Islam masih banyak yang terpuruk secara ekonomi di Indonesia. Tetapi menomorsatukan ekonomi juga bukan pilihan yang baik (Hasil wawancara).

Informan lain mengungkapkan, demikian:

Cara pandang umat Islam masih belum beranjak dari persoalan *furu'iyah*, yaitu persoalan fiqih. Mereka tidak berpikir ke depan tentang pentingnya pemimpin dan kepemimpinan yang akan membuat mereka terangkat derajatnya. Ini perlu penyadaran melalui dakwah-dakwah yang berwawasan luas. Islam itu bukan hanya sebatas ritus tetapi menjangkau urusan kepemimpinan (Hasil wawancara).

Seorang informan dari pesantren di Bandung mengungkapkan pendapatnya, demikian:

Mungkin ke depan perlu upaya-upaya penyadaran bagi umat Islam untuk mulai memikirkan tentang kepemimpinan. Strategi dan pola dakwah yang selalu lebih ke urusan ibadah mahdoh perlu dikombinasikan ke arah dakwah sosial kemasyarakatan, mislanya keutamaan memilih pemimpin dari orang-orang yang takwa dan memiliki kepedulian terhadap nasib umat Islam. Meskipun ini bukan persoalan mudah, tetapi perlu digarap oleh kita umat Islam. Dalam teori kepemimpinan, seorang pemimpin akan mewarnai masyarakatnya (Hasil wawancara).

Ketika disodorkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemimpin yang memiliki ketaatan akan intoleran kepada umat lain, salah seorang informan mengemukakan pendapatnya, demikian:

Nah ini sudah sangat politis. Maksudnya pandangan sebagaimana yang Anda tanyakan yang selama ini dihembuskan berbagai kalangan yang merasa ketakutan jika pemimpin yang taat (Islam). Mereka sengaja membesar-besarkan itu untuk melemahkan umat Islam, dan celaknya banyak umat Islam yang termakan oleh narasi itu. Mereka sengaja ingin “membius” umat Islam sehingga tidak dapat memimpin (Hasil wawancara).

Informan lain dari pesantren di Jakarta mengemukakan pendapatnya secara kritis, demikian:

Salah satu kelemahan umat Islam itu adalah rapuhnya persatuan. Para pemimpinnya juga tidak memiliki kearifan dan rasa saling membesarkan, yang ada justeru gontok-gontokan. Partai berlabel Islam banyak yang pecah, sebab jika tidak terpilih menjadi ketua umum lalu membuat partai baru. Umat terbelah sebab pemimpinnya tidak memiliki rasa istiqomah. Coba Anda sebutkan kepada saya siapa teladan kita dalam kepemimpinan di Indonesia saat ini? Saya dapat memastikan tidak ada. Yang ada adalah individu-individu yang rakus kekuasaan (Hasil wawancara).

Bila dikritisi dari hasil wawancara di muka, maka persoalan mendasar umat Islam saat ini dengan pilihan politiknya masih dipengaruhi rendahnya kesadaran akan makna pemimpin dan kepemimpinan yang justeru hal itu menjadi faktor lemahnya umat Islam. Faktor lain yang memengaruhi pilihan politik umat Islam adalah ekonomi. Pilihan terhadap pemilihan pemimpin bukan didasarkan atas siapa yang akan dipilih berdasarkan kriteria agama, tetapi lebih dipengaruhi oleh amplop (uang). Umat Islam menjadi rentan disogok, dikendalikan uang hanya untuk kepentingan sesaat. Mereka pada dasarnya sudah menemukan penyebabnya, oleh karena itu perlu

dakwah-dakwah berwawasan luas serta membangun dan meningkatkan sisi ekonomi umat ke taraf yang lebih baik.

Aktivitas dakwah yang saat ini banyak dilakukan lebih ke ceramah dari panggung ke panggung, dari masjid ke masjid dan seterusnya. Umat hanya dibekali pengetahuan yang sifatnya sesaat, namun dakwah yang berbasis pemberdayaan masih jarang dilakukan. Fakta ini seharusnya membawa kesadaran kepada para kiyai, ustadz dan lain-lain untuk mengubah orientasi serta strategi dakwah yang sesuai dengan tuntutan nyata umat Islam.

Kelompok kedua, memilih berdasarkan kompetensi. Kelompok ini dapat dikatakan kelompok moderat dari segi pemahaman keagamaan, meskipun secara teologis kerap kali dipertanyakan. Untuk kelompok yang kedua ini lebih banyak didominasi oleh pesantren-pesantren modern. Dalam pandangan mereka, seorang pemimpin itu harus memiliki kompetensi dalam mengatur negara. Tidak cukup modal pemhmn agama, tetapi harus dibarengi dengan kompetensi manajerial dan kepemimpinan (*leadership*) yang memadai.

Beberapa hasil wawanacra menunjukkan bahwa bagi kelompok kedua ini lebih menekankan kepada kemampuan kepemimpinan dan manajerial. Seorang informan dari pesantren di Yogyakarta mengungkapkan, demikian:

Kita senang bila yang menjadi pemimpin itu adalah sosok yang kuat keagamaannya (Islam) dan memiliki kecakapan dalam memimpin. Namun sayang sampai saat ini belum ada yang betul-betul seperti itu. Nah oleh karena itu, maka memilih pemimpin yang baik dari aspek kepemimpinan dan manajerialnya menjadi pilihan realistis untuk membawa Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Pemimpin itu berat pertanggungjawabannya, karena itu pemimpin yang adil jaminannya adalah surga (Hasil wawancara).

Informan lain dari pesantren di Banten mengatakan, demikian:

Sampai saat ini untuk level presiden masih dipegang umat Islam meskipun keberpihakannya masih jauh. Mungkin perlu waktu untuk mewujudkannya. Maka sebagai pilihan jangka pendek kita masih memilih mereka yang memiliki aspek kepemimpinan yang relatif baik. Ke depan kita mesti berjuang sehingga Indonesia benar-benar memiliki pemimpin yang ideal baik dari aspek agama maupun aspek manajerialnya. Saya ingin bahwa Islam dan umat Islam tidak sekedar dipolitisir untuk kepentingan pilpres atau pilkada misalnya, tetapi umat Islam harus bersatu untuk mengusung orang yang terbaik dari semua segi (Hasil wawancara).

Sejalan dengan informan di muka, salah seorang informan dari pengasuh pondok pesantren mahasiswa dari Purwokerto mengemukakan, demikian:

Umat Islam saat ini kehilangan sosok-sosok yang memiliki integritas tinggi, memiliki komitmen, dan memikirkan umat. Tokoh-tokoh yang muncul saat ini terutama dari kalangan partai politik masih jauh dari ideal. Mereka umumnya terjebak dalam lingkaran kekuasaan, jabatan dan tentu saja gepokan uang. Mereka diam ketika umat meronta memerlukan bantuan. Mereka diam ketika masyarakat dilanda kemiskinan. Mereka beku ketika umat diperlakukan tidak adil. Padahal mereka diantarkan umat ketika menduduki jabatan di pemerintahan. Tapi sampai saat ini kita tidak berdaya, kita dipaksa untuk memilih dari yang buruk dari yang terburuk (Hasil wawancara).

Bukan hanya beberapa kutipan wawancara di muka, sejumlah informan dari kalangan pesantren modern mengemukakan esensi yang sama. Pilihan realistis mereka saat ini adalah memilih pemimpin yang memiliki basis manajerial yang kuat, meskipun masih belum dapat dikatakan berpihak bagi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Pilihan dilematik itu akan membawa konsekuensi kemandegan umat Islam dalam jangka waktu panjang.

Umat Islam perlu memikirkan strategi untuk mempercepat perubahan yang selama ini “merugikan” umat Islam. Proses Pendidikan, pencerahan, pemberdayaan umat Islam dari berbagai aspek harus segera dilakukan. Perlu digagas dakwah kreatif, artinya dakwah tidak lagi tersekap dalam rutinitas seperti ceramah, tetapi harus mamapu memberikan pemberdayaan dalam berbagai aspek. Pencerahan dan pemberdayaan pada aspek politik. Sudah saatnya umat Islam tidak “alergi” politik, tetapi perlu berpolitik dengan mengedapankan nilai-nilai luhur Islam.

Kelompok ketiga, apatis-pragmatis, yaitu kelompok yang tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin pada berbagai level, termasuk presiden. Bagi mereka yang terpenting adalah aman dan bila perlu memperoleh bantuan untuk pengembangan pesantrennya. Memang agak menarik, ada beberapa pesantren yang tidak ingin disumbang oleh pemerintah atau perorangan karena takut mengganggu independensinya. Namun di sisi lain, ada beberapa pesantren yang mengharapakan bantuan dari pemerintah. Kelompok apatis-pragmatis ini dapat dimasukan kepada kelompok pesantren yang siap menerima bantuan dari pemerintah atau tokoh perorangan.

Beberapa petikan wawancara ini mendeskripsikan tentang kelompok apatis-pragmatis, demikian:

Kita tidak perlu terlalu mempersoalkan siapa yang akan memimpin bangsa ini, yang penting muslim dan mampu mensejahterakan rakyat. Saat ini yang paling penting adalah ekonomi supaya masyarakat dapat hidup dengan layak. Pemimpin yang diperlukan yaitu pemimpin yang dapat mendongkrak ekonomi dan mensejahterakan rakyat (Hasil wawancara).

Senada dengan informan di muka, salah seorang informan lain mengemukakan pendapatnya, demikian:

Saat ini persoalan umat lebih kepada persoalan ekonomi. Umat Islam banyak yang hidup kurang layak (miskin) sehingga perbaikan ekonomi umat menjadi lebih utama. Pemimpin yang tepat saat ini adalah sosok yang dapat menumbuhkan ekonomi. Bila persoalan ekonomi sudah dapat diatasi, maka perlahan-lahan aspek lain seperti sosial politik dapat digarap. Perlu penanganan secara bertahap (Hasil wawancara).

Informan lainnya berpendapat, demikian:

Dakwah yang tepat saat ini adalah dakwah yang dapat menumbuhkan gairah untuk terus berkarya secara ekonomi. Ada hadits yang mengatakan “kemiskinan menyebabkan kekufuran”. Berdasarkan hadits itu, maka memperbaiki ekonomi umat adalah jalan untuk menumbuhkan keimanan dan membunuh kekufuran (Hasil wawancara).

Sejakan dengan beberapa informan di muka, informan asal pesantren di Banten ini mengemukakan, demikian:

Persoalan umat Islam ini sangat kompleks, maka perlu penanggulangan secara bertahap dan prioritas. Kadang kita dihadapkan kepada dilema antara ekonomi terlebih dahulu atau sosial politik. Saya lebih memilih perbaikan ekonomi umat dulu sehingga

umat terbebas dari beban ekonomi. Setelah persoalan “perut” selesai, maka bisa ke urusan yang lebih jauh seperti social politik (Hasil wawancara).

Ketika diberikan pertanyaan tentang apakah pesantrennya menerima bantuan dari pemerintah, ia mengungkapkan, demikian:

Saya pikir bantuan dari manapun termasuk dari pemerintah tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengikat. Kalau mereka berharap dukungan itu sah-sah saja, tetapi itu tidak memaksa. Kita membuka diri kepada pihak mana pun untuk ikut membantu, karena pada dasarnya pesantren itu membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Masa yang seperti itu aja gak paham (Hasil wawancara).

Data hasil observasi mendeskripsikan, demikian:

Pesantren ini memang dalam fase pembangunan. Beberapa lokal tengah dalam pekerjaan. Ada beberapa lokal yang dibangun berlantai dua. Material bangunan berserakan bercampur dengan debu mesin pengaduk pasir. Beberapa orang pekerja sibuk memotong besi, mengaduk bahan bangunan, memasang bata, dan lain-lain. Beberapa orang santri juga ikut membantu para tukang menyediakan material yang dibutuhkan. Mereka bekerja dengan semangat meskipun kelelahan nampak di muka mereka (Hasil observasi)

Sejumlah informan lain mengemukakan pendapat yang nyaris sama. Umumnya mereka apatis terhadap siapa yang akan memimpin bangsa ini, tetapi lebih menekankan siapa tokoh yang mampu membawa perubahan pada aspek ekonomi. Dalam Bahasa mereka: “Yang terpenting pemimpin itu mampu membawa kesejahteraan”. Nilai pragmatismenya terletak pada ekonomi tanpa mempersoalkan pemimpin dari kalangan mana. Mereka juga berharap

bahwa pesantrennya dapat dibantu sekedar untuk menambah pembangunan fisik.

Memang sejak dulu hingga sekarang persoalan pesantren pada umumnya adalah persoalan fisik (bangunan). Sarana dan prasarana menjadi bagian yang menentukan dalam keberlangsungan pendidikan di pesantren. Tentu saja bukan sebatas itu, manajemen pesantren juga harus menyediakan pemondokan untuk santri putra dan putri. Semakin bertambahnya para santri maka semakin banyak ruangan yang diperlukan. Jika meresapi realitas seperti itu, maka harapan untuk mendapat bantuan menjadi realistis. Meskipun mereka juga memiliki rambu-rambu bahwa bantuan bersifat suka rela, artinya tidak ada “pesanan” untuk kepentingan tertentu, terutama kepentingan politik.

Ketiga kelompok pesantren di muka sangat kontras menggambarkan “jati diri” dan orientasi pesantrennya, dan orientasi itu pada gilirannya akan memengaruhi sikap dan pilihan politiknya pada perhelatan pilpres atau pilkada. Meskipun penelitian ini lokus dan fokusnya pesantren, tetapi pada sisi yang lain pesantren dapat dikatakan sebagai sumbu yang memengaruhi masyarakat sekitarnya. Apa yang dikatakan kiyai atau pesantren akan menjadi bagian perilaku dan “gen” politik yang akan dipraktikkan oleh masyarakat. Pada masyarakat yang secara budaya paternalistik dan secara pendidikan masih kurang, maka kiyai dan pesantren adalah patron yang akan diikuti oleh masyarakat. Sebagaimana telah diungkap di muka, bahwa banyak masyarakat meminta fatwa untuk hal-hal yang terkait dengan keagamaan (syariah) maupun yang terkait dengan urusan lain, seperti social politik.

4.4 Pemahaman Demokrasi Kalangan Pesantren di Indonesia

Sejatinya, demokrasi bukan keharusan tetapi sebuah pilihan politik untuk mendesain negara ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena pilihan politik, maka respons masyarakat termasuk dunia pesantren sangat beragam. Hal demikian tidak menjadi persoalan sepanjang dilakukan secara dewasa dan bertanggung jawab.

Sejauh ini, demokrasi yang memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat kerap kali menjadi diskursus yang panjang. Demokrasi yang dipahami sebatas pilpres atau pilkada, di mana rakyat diberikan hak penuh untuk menentukan pilihannya. Ini berlaku adagium “*vox populi vox dei*” (suara rakyat suara Tuhan). Ini yang kemudian banyak ditentang oleh banyak orang, terutama yang memiliki pemahaman keagamaan yang militan. Konsep “suara rakyat adalah suara Tuhan” yang menjelma menjadi “one man one vote” (satu orang satu suara) mereduksi dan menyamakan setiap orang menjadi sama. Ini pula yang banyak dikritik, bahwa tidak mungkin dalam realitasnya menyamakan satu suara dari orang yang berpendidikan tinggi dengan yang berpendidikan rendah. Tidak mungkin menyamakan suara kiyai yang saleh dengan pelacur, maling, koruptor dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua pandangan dan pemahaman atas demokrasi yang saat ini berlangsung di Indonesia termasuk di negara-negara lain, yaitu: (1) menerima dengan kritis dan (2) menolak. Argumentasi yang diajukan juga sangat beragam dari yang berbasis teologis hingga yang sekedarnya.

Pertama, kelompok yang menerima demokrasi secara kritis. Mereka beranggapan bahwa demokrasi sebuah pilihan rasional dan tidak mengandung keburukan sepanjang dijalankan dengan baik, jujur dan bertanggung jawab. Tetapi akan menjadi sumber masalah jika demokrasi dijalankan dengan tidak jujur, penuh tipu-tipu serta mengejar pragmatisme

politik. Demokrasi adalah alat, dan karenanya akan sangat tergantung orang yang menggunakannya. Secara substansi, demokrasi itu musyawarah-mufakat, dan itu merupakan sendi dari ajaran Islam. Bukankah ketika Rasulullah wafat para sahabat bermusyawarah untuk menggantikan Rasul? Demikianlah bahwa praktik demokrasi telah dijalankan semasa para sahabat. Keputusan untuk mengambil demokrasi sebagai sendi bernegara adalah pilihan rasional ditengah-tengah keragaman dan perbedaan pada realitas masyarakat Indonesia.

Beberapa pesantren modern dan semi modern setuju dengan konsep demokrasi yang saat ini dijalankan di Indonesia dengan catatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Demokrasi akan bermanfaat bila dilakukan secara jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Tetapi sebaliknya demokrasi akan menjadi malapetaka jika dijakankan untuk kepentingan pragmatisme semata, seperti manipulasi dalam pilpres dan pilkada lainnya. Demokrasi dijalankan untuk “menjndas” lawan politik, membekap orang-orang yang berbeda pendapat dan lain-lain.

Mereka beranggapan bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi negara hasil perjanjian para pendiri bangsa untuk mengikat perbedaan menjadi persatuan. Maka konsep demokrasi menjadi pilihan terbaik sehingga seluruh komponen bangsa yang beragam dapat ikut ambil bagian dalam membesarkan bangsa dan negara.

Beberapa kutipan wawancara berikut ini menggambarkan pandangan mereka tentang demokrasi, demikian:

Kami termasuk yang menerima demokrasi, atau tidak mempersoalkan demokrasi, karena bagi kami demokrasi sekedar alat dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tetapi praktek demokrasi harus benar jangan sampai demokrasi dijadikan sebagai alat untuk tipu-tipu. Demokrasi tidak boleh dijadikan alat

untuk menindas dan jangan karena alasan demokrasi sesuatu dapat dilakukan seenaknya. Intinya demokrasi tidak ada masalah sepanjang dilakukan dengan bertanggung jawab dan jujur (Hasil wawancara).

Salah seorang informan dari pesantren di Jakarta mengungkapkan pendapatnya, demikian:

Ada yang berpendapat bahwa demokrasi tidak ada dalam Islam, demokrasi produk Barat. Bagi saya itu tidak menjadi persoalan sepanjang demokrasi itu dapat mewujudkan keadilan dan mensejahterakan. Kuncinya bukan pada demokrasinya, tetapi pada keadilan. Jika kita mau kritis, banyak produk Barat yang kita gunakan, bukan hanya demokrasi. Teknologi yang kita gunakan saat ini nyaris seluruhnya produk Barat. Itu HP kan dari Barat, gak masalah kan? (Hasil wawancara).

Senada dengan itu, salah seorang informan dari salah satu pesantren modern di Jawa Timur mengungkapkan, demikian:

Tujuan bernegara itu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Negara tanpa keadilan akan rapuh dari berbagai rintangan, terutama dari gejolak masyarakat. Sebagai pilihan politik, maka demokrasi sah dan dapat digunakan termasuk di Indonesia. Kalau saya boleh berpendapat, tidak perlu ada dikotomi antara Barat dan Timur tentang demokrasi. Mendikotomikan demokrasi sebagai produk Barat akan membawa perpecahan yang tidak produktif. Justeru saat ini umat Islam terpuruk dikarenakan lebih menguatnya perbedaan pendapat yang tidak perlu (Hasil wawancara).

Informan lain dari pesantren di Tasikmalaya mengemukakan pendapatnya, demikian:

Kita tidak harus memperdebatkan demokrasi itu apakah dari Barat atau dari Yunani sebagai warisan para filosof. Kita harus melihat esensi dari demokrasi itu, yakni dapat mempersatukan warga negara, memperkokoh persatuan, meningkatkan derajat negara di mata dunia, dan yang terpenting dapat membawa negara ini lebih adil dan sejahtera. Harus diingat tujuan didirikannya negara untuk meningkatkan derajat kesejahteraan, melindungi hak-haknya, mencerdaskan anak-anak bangsa, dan lain-lain (Hasil wawancara).

Namun ketika disodorkan pertanyaan tentang “satu orang satu suara” sebagaimana berlangsung dalam pilpres atau pilkada saat ini, informan ini mengerutkan keningnya. Ia berpendapat, demikian:

Memang itu salah satu ganjalan dalam demokrasi yang diimport dari Barat. Barat memandang demokrasi lebih ke kuantitas bukan kualitas. Saya menyadari sepenuhnya bagi orang-orang yang berdebat masalah ini. Namun ini saya pikir ada tahapan-tahapan yang mungkin harus dilalui untuk mencapai idealitas demokrasi sesungguhnya. Perlu waktu, dan umat Islam perlu belajar lebih dalam lagi sehingga mampu menampilkan demokrasi yang sebaik-baiknya (Hasil wawancara).

Informan dari salah satu pesantren di Jawa Tengah berpendapat kritis. Ia mengungkapkan, demikian:

Perdebatan tentang satu orang satu suara itu telah memakan waktu yang lama dan menjadi bahan diskusi yang panjang pula. Saudara-saudara kita yang terjun ke gerakan “garis keras” misalnya, dipicu oleh salah satunya ketidaksetujuan tentang konsep demokrasi ini. Dari situ lalu munculah yang mereka sebut sebagai konsep khilafah. Dalam pandangan mereka pemimpin harus dipilih oleh orang-orang yang saleh (Hasil wawancara).

Kutipan wawancara yang di muat di muka serta beberapa hasil wawancara yang tidak di-*display* memberikan informasi penting tentang pandangan dan pemahaman kelompok pertama mengenai demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai alat bukan tujuan. Artinya, demokrasi sebagai cara atau ikhtiar dalam mewujudkan negara yang adil dan Makmur. Demokrasi tidak harus dipandang bsebagai produk Barat yang “haram”, tetapi harus dipahami sebagai ikhtiar manusia dalam mewujudkan cita-cita Bersama dan bernegara. Politik, demokrasi, negara atau apapun namanya sekedar alat yang harus berkhidmat untuk ibadah kepada Tuhan. Kelompok ini seakan ingin memberikan justifikasi bahwa tujuan lebih penting daripada alat.

Kelompok ini lebih mengutamakan esensi tentang kejujuran, keadilan, kesejahteraan dan lain-lain. Sedangkan alat yang digunakan dapat bermacam-macam seperti demokrasi “ala” Barat saat ini. Namun jika dikonfrontir dengan fakta saat ini tentang demokrasi, apa yang mereka sampaikan masih jauh dari ideal. Demokrasi yang saat ini dipraktekan masih jauh dari nilai-nilai luhur, bahkan praktek demokrasi saat ini cenderung “hampa” nilai. Simpulan dari kelompok pertama ini adalah menerima demokrasi sepanjang dilakukan dan dijalankan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Kedua, kelompok yang menolak demokrasi. Kelomppk ini lebih banyak didominasi oleh kelompok pesantren *salafiyah* (tradisional). Mereka umumnya memandang bahwa demokrasi sebagai produk Barat yang tidak dicontohkan dalam Islam. Mereka berpandangan bahwa dalam memilih pemimpin tidak dilakukan menggunakan pemlihan langsung seperti saat ini yang menyebabkan umat terbelah. Mereka merindukan tata cara yang dilakukan oleh para sahabat dengan menunjuk langsung orang yang

dianggap paling saleh dan menjaga amanah. Bagi mereka demokrasi itu banyak membawa *madharat* dan perpecahan.

Berikut ini beberapa kutipan yang memandang demokrasi “haram” yang tidak dicontohkan dalam dunia Islam, terutama pada saat Rasulullah dan para sahabat, demikian:

Demokrasi itu tidak ada dalam Islam, terutama dalam pemilihan pemimpin dengan satu orang satu suara. Ini berbahaya, karena suara orang saleh akan sama nilainya dengan orang munafik, kafir, dan lain-lain. Oleh karena itu, cara memilih pemimpin tidak menggunakan cara-cara Barat yang tidak ada dalam Islam. Justeru demokrasi saat ini yang berjalan seperti di Indonesia lebih banyak memecah belah umat daripada menyatukan umat. Lihat saja, setelah pilpres kemarin umat terbagi menjadi dua kelompok, dan itu berlangsung sampai saat ini (Hasil wawancara).

Informan lain dari pesantren di Yogyakarta mengungkapkan kegelisahannya pasca pilpres 2019, demikian:

Coba Anda hayati kondisi saat ini. Saya termasuk orang yang gelisah dan khawatir situasi kondisi saat ini. Setelah pilpres selesai, persetruan dua kubu tidak kunjung selesai, bahkan terus meruncing dan berdampak ke mana-mana. Para elit sudah bagi-bagi kue kekuasaan. Para pendukung kelas atas sudah duduk di kursi-kursi empuk dan bergelimang tunjangan. Sementara di akar rumput masyarakat masih cakar-cakaran, saling menghujat, saling menghina, saling memfitnah, saling melaporkan dan lain-lain. Inikah buah demokrasi itu? (Hasil wawancara).

Senada dengan pendapat di muka, salah seorang informan dari pesantren di Jawa Tengah yang tidak mau disebutkan namanya berpendapat, demikian:

Umat Islam terpuruk karena tidak mencontoh Rasul dan para sahabat dalam memilih pemimpin. Mereka gontok-gontokan dan saling bersaing, dan itu yang menjadi nilai demokrasi. Demokrasi menyimpan bara dalam sekam membelah umat menjadi terkotak-kotak. Pilpres 2019 yang baru lalu adalah bukti umat terbelah menjadi dua bagian. Luka-luka sebagai residu dari demokrasi sangat buruk bagi kesatuan umat Islam. Pada zaman para sahabat, demokrasi dalam memilih pemimpin bukan satu orang satu suara, tetapi sendi demokrasi dengan landasan musyawarah, yakni memilih berdasarkan kesepakatan. Tidak ada praktik pemungutan suara, dan mereka yang memilih atau bermusyawarah untuk mengambil keputusan adalah orang-orang yang kesalehannya tidak diragukan lagi. Ingat itu (Hasil wawancara).

Pendapat lain diungkapkan oleh salah seorang informan dari pesantren di daerah Magetan, demikian:

Dalam urusan politik umat Islam yang mayoritas tidak pernah menang, karena kurangnya pemahaman umat Islam itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa umat Islam “disetir” oleh umat lain atau oleh umat Islam yang tidak berpihak bagi umat Islam sendiri. Ini perlu usaha semua pihak, terutama para elit dari kalangan umat Islam yang peduli kepada nasib umat Islam. Namun demikian, usaha-usaha yang dilakukan harus elegan dan tidak menimbulkan dampak negatif (Hasil wawancara).

Informan berikutnya dari salah satu pesantren di Yogyakarta mengungkapkan pendapatnya, demikian:

Demokrasi ya....., saya termasuk orang yang menolak demokrasi dalam arti demokrasi yang saat ini dilaksanakan di Indonesia dalam praktik pilpres maupun pilkada. Cenderung liar, destruktif dan penuh penipuan. Bagaimana kualitas orang yang sengaja disogok untuk memenangkan calon tertentu, bagaimana politik uang, bagaimana intimidasi demi memenangkan calon tertentu, bagaimana permainan media yang tidak netral, dan sejumlah pertanyaan lainnya. Hemat saya, praktik demokrasi yang disederhanakan menjadi satu orang satu suara tidak sejalan dengan contoh dari Islam (Hasil wawancara).

Ketika disodorkan pertanyaan yang terkait dengan adanya sekelompok umat Islam yang ingin mengganti demokrasi termasuk falsafah negara dengan cara-cara kekerasan, salah seorang informan mengatakan, demikian:

Saya secara pribadi tidak setuju dengan cara-cara kekerasan yang ditempuh teman-teman kita dalam berjuang menegakkan syariah. Dalam pandangan saya, cara-cara kekerasan hanya akan membuat umat Islam distigma negatif, dan terbukti sampai saat ini tidak berhasil. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak ada legitimasinya dalam Islam, apalagi bunuh diri. Untuk membangun peradaban politik yang baik dan bermartabat diperlukan cara-cara yang baik. Bukan kekerasan, bukan bunuh diri, bukan menciptakan ketakutan, dan lain-lain. Warna Islam adalah perdamaian, kemanusiaan dan keadilan(Hasil wawancara).

Informan yang sudah agak sepuhdari Garut Jawa Barat mengemukakan pendapatnya, demikian:

Cara-cara kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah citra buruk umat Islam. Anda dapat melihat bagaimana ISIS di Timur Tengah. Kita perlu mendefinisikan jihad pada aspek lain seperti pengentasan kemiskinan dan buta huruf, membangun ekonomi umat dan memperkuat persatuan. Umat perlu dididik cara berpikirnya sehingga berkualitas. Kemunduran umat Islam saat ini lebih dikarenakan pemahaman keagamaan yang sempit dan cenderung saling menyalahkan (Hasil wawancara).

Beberapa hasil wawancara yang lain menunjukkan memiliki arah dan makna yang sama, bahwa cara-cara yang ditempuh umat Islam melalui jalan kekerasan tidak akan berhasil dan hanya akan menghasilkan citra buruk bagi umat Islam. Islam itu "*rahmatan lil 'alamin*", artinya dilarang melakukan kekerasan dalam berdakwah, apalagi sampai bunuh diri. Berkembangnya aliran-aliran "takfiri" yang saling menyudutkan bahkan saling mengkafirkan menjadi tidak kondusif bagi perkembangan umat Islam. Mengkaji Al-Qur'an itu harus secara komprehensif, dan kurang bijak bila hanya memilih-milih atau memilah-milah ayat untuk kepentingan tertentu (Disarikan dari hasil wawancara).

Seorang informan dari Cirebon Jawa barat mengungkapkan agak lebih panjang, demikian:

Islam sebagai agama yang memanusiakan manusia tidak memberikan tempat kepada bentuk kekerasan apapun. Kekerasan atau istilah lain perang dapat dilakukan dalam kondisi perang sebagaimana pada zaman Rasul dan para sahabat. Pada negara yang tidak ada perang seperti di Indonesia tidak ada alasan untuk menebar ancaman, ketakutan atau meledakan tempat-tempat tertentu seperti hotel dan lain sebagainya. Dakwah harus dilakukan dengan damai, akhlakul karimah, penuh cinta dan lain-lain. Sekalipun negara ini bukan negara

Islam, tetapi tidak ada tempat untuk melakukan kekerasan. Teror yang selama ini dilakukan oleh beberapa orang Islam telah mencederai *kehanifan* (kesucian) Islam itu sendiri (Hasil wawancara).

Seorang informan dari Kabupaten Bandung Jawa Barat memberikan pandangannya, demikian:

Sebagian saudara kita yang melakukan teror dan kekerasan mengatasnamakan agama sangat disayangkan, karena telah memberikan gambaran bahwa Islam itu penuh dengan kekerasan dan kedengkian. Islam itu ditegakkan atas dasar “pedang”. Perang atau kekerasan itu ada syaratnya, ada tuntunannya, dan tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang kuat. Ayat-ayat yang mengandung atau membolehkan perang harus dikaji secara mendalam karena ada asbabul nuzulnya. Dan begitu pun dengan hadits-hadits yang dijadikan alat legitimasi perang harus dikaji dan diketahui asbabul wurudnya. Dengan demikian, kita akan lebih hati-hati untuk melakukan kekerasan atas nama agama (Hasil wawancara).

Dari data hasil penelitian, meskipun kelompok kedua ini menolak demokrasi dengan sejumlah alasan, tetapi mereka tidak mendukung aksi kekerasan yang dilakukan umat Islam, katakanlah gerakan terorisme. Mereka sadar bahwa Islam menjadi terpuruk karena adanya sekelompok umat Islam yang mengambil jalan kekerasan. Dakwah Rasulullah dan para sahabat adalah dakwah yang mengedepankan akhlak, humanisme, dan cara-cara yang baik. Dari cara-cara itu Islam berkembang dan menjadi agama yang mendunia. Sebaliknya, jika Islam disebarkan melalui cara-cara yang mengedepankan kekerasan, maka dampaknya akan buruk bagi Islam itu sendiri. Saat ini umat Islam tengah terpuruk, jika ada sebagian kecil yang “menghalalkan” kekerasan.

Meskipun penelitian ini dilakukan pada sebagian pesantren saja yang ada di Pulau Jawa, tetapi memiliki makna penting karena pesantren menempati posisi penting dalam lingkup sosiologis masyarakat Indonesia. Pesantren adalah rujukan tentang berbagai masalah keumatan, terutama tentang ajaran Islam (syariah). Bila ada sesuatu yang dianggap “abu-abu” pada ranah kehidupan sosial dan bernegara, maka pesantren kerap kali dimintai pendapatnya. Kiyai menjadi sentral keberadaannya untuk memberikan pencerahan atas problematika umat yang berkembang, bukan hanya urusan yang terkait dengan ibadah tetapi menyentuh kepada urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Tetapi meskipun penelitian ini diwakili oleh beberapa pesantren di Pulau Jawa, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Hal ini sesuai dengan cara berpikir kualitatif yang tidak hendak menemukan generalisasi. Kasus-kasus yang ditemukan pada beberapa pesantren dimungkinkan memiliki perbedaan pada pesantren-pesantren lainnya.

4.5 Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan, yaitu: (1) peta ideologi politik umat Islam dalam pilpres dalam bingkai demokratis di Indonesia beberapa waktu yang lalu terfragmentasi menjadi tiga kelompok, yaitu memilih berdasarkan prinsip agama, memilih berdasarkan kompetensi, dan memilih berdasarkan pertimbangan apatus-pragmatis. (2) pandangan dan pemahaman kalangan pesantren terhadap demokrasi terpolarisasi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang menerima secara kritis dan sejumlah argumentasi, dan yang menolak dengan alasan utama tidak ada contoh dalam Islam.

Secara referensial, bagaimana bentuk hubungan antara agama dan negara, termasuk dalam konteks yang lebih sempit seperti politik terbelah menjadi tiga kutub, yaitu: (1) Agama mengatur negara dan politik; (2) agama

hanya sebagai rujukan nilai dalam praktik bernegara dan berpolitik; dan (3) agama dan negara, termasuk politik terpisah (Sjadzali, 1993:1-2).

Pertarungan ketiga pandangan ini terus bergulir baik dari sisi akademis-teoretik maupun secara praksis di lapangan. Kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan mengatur aspek negara dan politik kerap kali mengambil “jalan pintas” dengan melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan konstitusi. Ini salah satunya terjadi di Indonesia.

Mereka umumnya memiliki pendirian bahwa seluruh undang-undang dan aturan turunannya harus bersumber dari Al-Qur’an. Pancasila merupakan produk manusia yang memiliki banyak kelemahan. Untuk itu mereka meyakini untuk membawa kesejahteraan dan keadilan maka harus berlaku hukum Allah yang diturunkan dari Al-Qur’an. Pikiran-pikiran ini pada dasarnya bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Pikiran-pikiran itu telah muncul sejak Indonesia berdiri puluhan tahun yang lalu. Perdebatan ini sebagaimana terekam secara utuh dalam sidang-sidang majelis konstituante. Natsir (2014:32), Pancasila akan tumbuh subur di atas naungan Al-Qur’an.

Disadari atau tidak, pesantren merupakan institusi pendidikan yang telah mengakar dalam sejarah umat Islam Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, pesantren tidak saja bergerak dalam bidang pendidikan, tetapi menjadi basis-basis perlawanan dalam merebut kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, fungsi dan peran pesantren mulai bergeser lebih jauh, yaitu sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam konstelasi politik. Meski hal itu dilakukan tidak secara terang-terangan, tetapi pengaruh pesantren yang memiliki ratusan ribu bahkan jutaan jamaah telah memberikan “warna” dalam membangun ruang politik di Indonesia. Institusi pesantren memberi peran penting dalam membangun kesadaran. Ini yang dikatakan oleh Rivauzi (2007) sebagai derivasi dari fungsi pesantren pada tataran sosial.

Oleh karena itu tidak menjadi aneh jika menjelang pilpres maupun pilkada banyak tokoh atau kandidat yang berkunjung (bersilatullah) ke pesantren dengan harapan mendapat dukungan. Para kandidat sadar, bahwa dukungan pesantren akan diikuti jamaahnya dalam jumlah yang besar. Misalnya, pondok pesantren Gontor selalu menjadi tujuan para kandidat dalam meraih dukungan dan legitimasi guna memenangkan pilpres atau pilkada.

Namun demikian, kalangan pesantren pun tidak gegabah dalam memberikan dukungan, biasanya bermain “aman” dengan mengatakan bahwa pesantren ini terbuka untuk siapa pun. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada jamaahnya dalam menentukan pilihan. Meskipun permainan itu juga terjadi “dibalik layar” dengan secara tersembunyi mendukung salah satu kandidat (calon). Secara politik, pesantren “bermain aman” sehingga tidak membelah umat menjadi pro dan kontra.

Pada ranah politik praktis, ketika pesantren memberikan kebebasan kepada jamaahnya dalam menentukan pilihan, maka secara langsung melakukan praktik politik demokrasi. Inti dari demokrasi adalah kebebasan individu untuk menentukan pilihannya sendiri. Ini sesuai dengan prinsip *freedom* dan *freeact*. Dalam logika demokrasi, penghormatan terhadap kemerdekaan dalam menentukan pilihan politik menjadi esensi yang tidak bisa diganggu gugat. Sebagaimana dikatakan Anugrah, dkk., (2015:49), pada sistem demokrasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Namun demikian, suatu demokrasi pada sebuah negara akan berjalan dengan baik jika dilandasi oleh sikap dan perilaku yang positif. Sikap itu tercermin dari beberapa aspek: (1) kesadaran akan pluralisme, (2) sikap yang jujur dan pikiran yang sehat, (3) kerjasama dengan itikad yang baik, (4)

sikap dewasa, dan (5) demokrasi membutuhkan pertimbangan moral (Anugrah, dkk., 2015:53-54).

Keterlibatan pesantren di wilayah politik sebagaimana tercermin saat ini di Indonesia sesuatu yang tidak terhindarkan. Alasannya, pesantren memiliki banyak jamaah yang menjadi aspek penting dalam mekanisme demokrasi. Ketika sistem pemilu menggunakan *one man one vote* (satu orang satu suara), maka jamaah menjadi sangat penting sebagai basis suara. Di sisi lain, semakin banyak jumlah jamaah suatu pesantren maka akan semakin menaikkan daya tawar. Oleh karena itu pesantren-pesantren besar dengan kiyai-kiyai yang berpengaruh menjadi rebutan para kandidat.

Namun demikian, masuknya pesantren ke arena politik menjadi pro dan kontra. Kelompok yang pro beranggapan bahwa pesantren harus berjuang dalam upaya menegakkan syariah, dan pada sistem demokrasi pesantren memiliki kesempatan untuk itu. Pesantren tidak boleh tinggal diam dan harus ikut berjuang dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam sehingga cita-cita negara yang diridhoi Allah akan terwujud. Ini sebagai manifestasi dari perwujudan konsep negara integralistik.

Sedangkan bagi mereka yang kontra, beranggapan bahwa pesantren tidak boleh ikut campur urusan politik (dunia), sebab politik dipersepsikan sebagai arena “kotor” yang penuh tipu muslihat dan kerap kali menghalalkan segala cara. Pesantren cukup berada di wilayah moral, memberikan tuntunan kepada para politisi untuk bertindak sesuai ajaran agama. Kelompok ini pun secara substantif ingin menjaga marwah pesantren sebagai institusi moral. Pesantren tidak boleh dikotori oleh perilaku tidak terpuji sebagai residu dari saling sikut para politisi. Bila itu terjadi maka akan ada sentimen negatif kepada pesantren.

Dalam politik, ada adagium “tidak ada makan siang yang gratis”, artinya bila ada banyak tokoh mengunjungi pesantren dapat dipastikan

mencari dukungan. Ini yang kemudian membawa pesantren sebagai basis moral terjun ke wilayah politik praktis. Jika saling dukung-mendukung ini terus berlanjut, maka akan terjadi gesekan kepentingan pada jamaah pesantren. Apabila terus dibiarkan justeru pesantren ditakutkan kehilangan wibawanya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peta ideologi umat Islam dalam perhelatan pilpres 2019 terpolarisasi menjadi tiga kelompok, yaitu memilih basis agama, memilih dengan basis kompetensi, dan memilih secara apatis-pragmatis. Pada kelompok pertama lebih didominasi oleh pesantren-pesantren salafiyah-tradisional, pada kelompok kedua oleh pesantren modern. Sedangkan untuk kelompok ketiga lebih banyak didominasi oleh pesantren salafiyah-tradisional, terutama yang berdomisili di perdesaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa, pilihan dan peta umat Islam dalam bingkai demokrasi masih dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik yang cenderung pragmatis.

Peta pemahaman demokrasi di kalangan pesantren terbagi ke dalam dua bagian, yaitu kelompok pesantren yang menerima demokrasi dan kelompok pesantren yang menolak demokrasi. Pada kelompok pertama, mereka beranggapan bahwa demokrasi sekedar alat bukan tujuan. Oleh karena itu demokrasi tidak menjadi persoalan. Asalkan demokrasi dijalankan secara kritis, jujur dan bertanggung jawab.

Sedangkan bagi kelompok kedua, beranggapan bahwa demokrasi berasal dari Barat dan tidak dikenal dalam dunia Islam. Oleh karena itu demokrasi harus ditolak. Ketika demokrasi dimaknai pemberian suara orang per orang dalam pilpres misalnya, maka suara orang saleh akan sama nilainya dengan orang yang tidak saleh. Dalam pandangan mereka, sistem demokrasi *one man one vote* tidak sesuai dengan politik luhur Islam.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu:

1. Perlu ada penelitian lanjutan yang lebih banyak melibatkan pesantren di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya sehingga dapat lebih memotret tentang peta umat Islam lebih besar lagi.
2. Perlu adanya paradigma lain dalam penelitian lanjutan, misalnya paradigma kritis atau mungkin menggunakan positivistik sehingga dapat dijadikan sebagai pembandingan.
3. Perlu adanya kolaborasi dengan lembaga-lembaga donor untuk pembiayaan, mengingat penelitian seperti ini membutuhkan waktu dan biaya besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus SB, 2016. Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media. Jakarta: Daulat Press.
- Anugrah, Dadan, dkk., 2015. Etika Berwarganegara. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arwiyah, Yahya dan Runik Machfiroh, 2014. Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Basrowi dan Sukidin, 2002. Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendekia.
- Beethan, O dan Kevin Boyle. 2000. Demokrasi: 80 Tanya Jawab. Yogyakarta: Kanisius.
- Birowo, Antonius (Ed)., 2004. Metode Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Gitanyali.
- Bodenhamer David, J. 2001. Federalism and Democracy. Working Paper. Washington D.C. : US Department of State.
- Brannen, Julia, 2002. Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhan, Wirman, 2014. Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945: Rajagrafindo
- Darmodihardjo, dkk. 1991. Santiaji Pancasila (Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional). Surabaya: Usaha Nasional.
- Daulay, Haidar Putra. 2004. Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fokus Media. 2004. Undang-undang Otonomi Oaerah. Bandung: Fokus Media.

- Ghazali, A. Muchtar dan Abdul Majid, 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Interes Media Foundation.
- Herlia, Tati. 2004. Fenomena Kultur dan Politik Indonesia. Jurnal Dephan. Jakarta.
- ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. Jakarta: UIN dan Prenada Media.
- Irawan, Agus, 2018. Akar Sejarah Etika Pesantren di Nusantara. Jakarta: Pustaka Iman.
- Iskatrinah. 2004. Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik. Makalah.
- Juliardi, Budi, 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2013. Pendidikan Keawrganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, 2015. Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil dan Kansii. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kealan, 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusnardi, M. dan Bintang Saragih. 2000. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Manan Bagir. 2005. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: Ull Press.
- Melvin I. Urofsky. 2001. Principles of Democracy. Working Paper. US Department of State. Washington D.C.
- MH, Amin Jaiz. 1980. Pokok-pokok Ajaran Islam. Jakarta: Korpri Unit PT. Asuransi Jasa Indonesia.

- Muhadjir, Noeng, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Natsir, Mohammad, 2014. Islam Sebagai Dasar Negara. Bandung: Segarsy.
- Nurtjahjo, Hendra, 2008. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pawito, 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKiS
- Rivauzi, Ahmad, 2007. Pendidikan Berbasis Spiritual. Jakarta: Bumi Ayu.
- Salim, Agus (Penyunting), 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sinar Grafika: 2005. UUD 1945 Hasil Amandemen. Jakarta.: Sinar Grafika.
- Sjadzali, Munawir, 1993. Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syarbaini, Syahrial (Editor). 2005. Materi Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Jakarta : Sus-cadoswar, Dikti.
- Taniredja, Tukiran, Muhammad Affandi dan Efi Miftah Faridli, 2012. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahidin, Samsul, 2010. Pokok-Pokok pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, 2018. Falsafah Pancasila. Depok: Pramedia Group.
- Winarno, 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.



PETA IDEOLOGI UMMAT ISLAM PADA SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Penelitian Pada Beberapa Pesantren di Pulau Jawa)

Peta ideologi umat Islam dalam perhelatan pilpres 2019 terpolarisasi menjadi tiga kelompok, yaitu memilih basis agama, memilih dengan basis kompetensi, dan memilih secara apatis-pragmatis. Pada kelompok pertama lebih didominasi oleh pesantren-pesantren salafiyah-tradisional, pada kelompok kedua oleh pesantren modern. Sedangkan untuk kelompok ketiga lebih banyak didominasi oleh pesantren salafiyah-tradisional, terutama yang berdomisili di perdesaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa, pilihan dan peta umat Islam dalam bingkai demokrasi masih dipengaruhi oleh pilihan-pilihan politik yang cenderung pragmatis. Sedangkan bagi kelompok kedua, beranggapan bahwa demokrasi berasal dari Barat dan tidak dikenal dalam dunia Islam. Oleh karena itu demokrasi harus ditolak. Ketika demokrasi dimaknai pemberian suara orang per orang dalam pilpres misalnya, maka suara orang saleh akan sama nilainya dengan orang yang tidak saleh. Dalam pandangan mereka, sistem demokrasione man one vote tidak sesuai dengan politik luhur Islam.

Kata Kunci : Politik, Islam dan Pemilu

Penerbit:
LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH Nasution No. 105 Bandung

